

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

***IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT POLICY
IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN
MANGGRAI BARAT DISTRICT***



MUHAMAD GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 105 03 11 00822

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik
Kebudayaan : Kebijakan Publik

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMAD GUNAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105 03 11 00822

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Yang Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMAD GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 105 03 11 00822

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian Tesis pada tanggal 23 Juni 2021

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I Komisi

Pembimbing Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Prof. Erwin Akib, S.PD., M.PD., PH.D
NBM.0901107602


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107 6424

Pernyataan Keaslian Tesis

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Gunawan
Nim : 105 03 11 00822
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya tulis ini benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

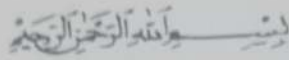
Makassar, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

Muhamad Gunawan



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis ini dengan judul **"Implmentasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat"** Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, para penuntut ilmu dan umatnya yang selalu istiqomah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis beberapa kali mengalami hambatan dan tantangan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan penulis putus semangat dalam menyelesaikan tesis tersebut. Penulis menyadari bahwa keikhlasan, usaha, serta doa yang akan membawa kelancaran dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudir Muhamad, S. Pd dan Ibunda Siti Soliha yang telah merawat, mendidik, dan senantiasa memberikan nasehat, dukungan, harapan, serta doa yang tulus. Serta kepada istri saya Ibu Rosma, atas segala bantuan, motivasi dan pengingat dengan segala moodnya dalam menemani penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir H. Abdul Rakhim Nanda ST, MT, IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Prof. Erwin Akib, S.Pd, M.Pd.,PH.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibunda Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik sekaligus sebagai pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf pegawai di lingkup Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajar dan membantu penulis
6. Teman-teman MIAP (Magister Ilmu Administrasi Publik) angkatan 2022 sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan toga.

Demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

Muhamad Gunawan, Fatmawati A Mappasere dan Muhlis Madani 2025.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat, tujuannya untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh pengembangan pariwisata superpremium terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat, dengan fokus pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014 - 2025 di Kabupaten Manggarai Barat. Proses identifikasi dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara serta observasi secara langsung melalui metode kualitatif, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan juga menggunakan analisis aplikasi Nvivo Plus 12. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh George C. Edward, sedangkan untuk mengukur proses implementasi kebijakan dapat dilihat pada unsur perancangan program, koordinasi dan pelaksanaan. Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata berfokus pada empat aspek dasar, yaitu pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Kemudian unsur koordinasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta telah berhasil mendorong pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata dan mendorong pariwisata Labuan Bajo menjadi wisata prioritas di Indonesia. pengembangan pariwisata yang terus berkelanjutan dan trend kunjungan yang terus meningkat menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar pada APBD melalui retribusi pariwisata, akan tetapi terdapat kendala miskordinasi pada pemungutan retribusi pariwisata khususnya di Taman Nasional Komodo tahun 2023. Kemunculan polemik kenaikan harga tiket ini berimbas pada turunya minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai obyek wisata di Labuan Bajo. Hal ini bisa menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan PAD yang di hasilkan dari retribusi pariwisata. Penelitian ini memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat khususnya di Labuan Bajo agar dapat berkolaborasi dengan baik dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan kualitas destinasi dan memberikan pengaruh yang baik pada kunjungan wisatawan dan pungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.

Kata Kunci : Program, Koordinasi, PAD dan Pariwisata.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep	15
1. Kebijakan Publik	15
2. Implementasi Kebijakan.....	17
3. Kebijakan Pariwisata	24
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian	33
E. Deskripsi Fokus.....	33
BAB III.....	39
METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41

F. Teknik Analisis Data	43
G. Keabsahan Data	44
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulukumba	47
2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulukumba	51
3. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba	52
B. Hasil Penelitian	53
1. Proses Impelementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	54
2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengebangan Pariwisata	70
C. Pembahasan Hasil Penlitian	116
1. Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba	116
2. Keberhasilan Implmentasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba	117
BAB V	122
PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan luas 1,904,569 km² dengan garis pantai 54,716 Km membuat Indonesia mempunyai banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikembangkan. Sejalan dengan itu Indonesia melalui kementerian pariwisata mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sector kepariwisataan yang di teruskan ke masing-masing kabupaten.

Pariwisata adalah salah satu potensi yang kini banyak digali dan dikembangkan di banyak negara. Ada peningkatan kecenderungan pasar pariwisata internasional untuk berwisata di kawasan yang masih alami. Kecenderungan ini memberi peluang bagi pengembangan pariwisata Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati, memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan 17.504 pulau, di mana 10.000 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau kecil, bahkan sangat kecil, belum bernama dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau kecil memiliki potensi dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dalam bentuk wisata bahari (marine tourism) ataupun ekowisata (ecotourism). (Qodriyatun, 2019)

Hal ini tercantum dalam UU Republik Indonesia No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dimana kawasan pariwisata dikhususkan untuk seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan

Pariwisata di Indonesia menurut (Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan) pasal 1 (5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Indonesia kaya wisata bahari yang mempesona, keanekaragaman terumbu karang bawah laut yang memikat wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dapat dilihat Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar.(Musaddad et al., 2019). Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya peraturan daerah Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025. Pasal 15 (a) pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri (b) pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.

Goeldner dan Ritchie (2006) dalam (Murdiastuti et al., 2014) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari

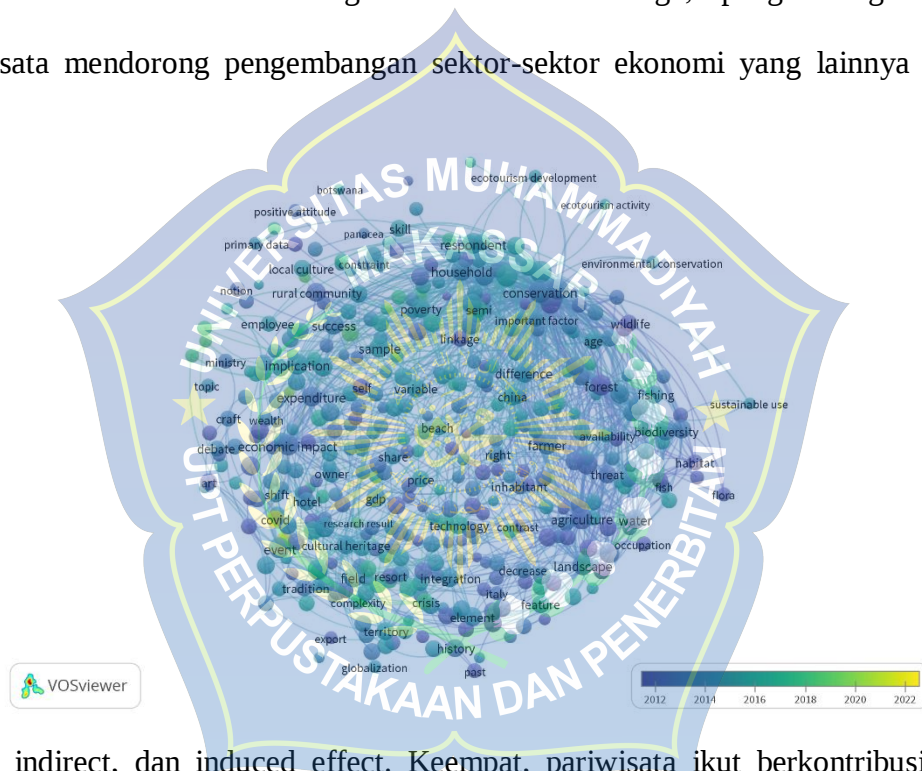
yang berlangsung di suatu destinasi. Sedangkan Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi.

Sektor pariwisata saat ini merupakan sektor alternatif yang diunggulkan untuk mendorong perekonomian Indonesia setelah sektor-sektor yang lain yaitu sektor industri dan perdagangan mengalami kelesuan. Kelesuan sektor industri dan perdagangan tersebut disebabkan oleh kelesuan ekonomi negara-negara di dunia yang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia. (Sya'rawie, 2020).

Pariwisata sebagai core economy, kini menjadi tujuan bersama, tak hanya segenap insan Kemenpar, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan kita akan bertransformasi menjadi sebuah negara besar yang sebagian ekonominya didukung sektor pariwisata. Laporan *World Travel and Tourism Council* (WTTC) juga menambahkan bahwa di kebanyakan Negara, wisata pesisir merupakan industry wisata terbesar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai salah satu sektor ekonomi penting maka pariwisata memiliki dampak yang berlipat ganda, baik positif dan negatif, bagi manusia dan lingkungan. Secara garis besar dampak industri pariwisata dapat digolongkan ke dalam

tiga dampak, yakni dampak lingkungan, dampak sosial-budaya dan dampak ekonomi. (Eldi Mulyana, 2019).

Pariwisata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berapa jalur. Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, pengembangan pariwisata menstimulus investasi dibidang infrastruktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lainnya melalui



direct, indirect, dan induced effect. Keempat, pariwisata ikut berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kelima, pariwisata menyebabkan positive economies of scale. Pariwisata juga merupakan faktor penting dalam penyebaran technical knowledge, mendorong research and development, dan akumulasi modal manusia. (Yakup, 2019). Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui

pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) (Musaddad et al., 2019).

Label pada gambar merupakan istilah atau kata kunci yang sering muncul, sedangkan warna menandakan sebuah kelompok. Setiap lingkaran mewakili kata kunci yang sering muncul. Sementara ukuran lingkaran menandakan jumlah publikasi yang memiliki hubungan dengan istilah tersebut dalam judul dokumen. Semakin besar ukuran lingkaran, hal ini berarti semakin banyak jumlah dokumen yang relevan dengan kata kunci.

Istilah judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah” diterbitkan pada tahun 2022, diberi warna kuning sebab merupakan artikel terbitan dua tahun terakhir. Sementara memiliki ukuran lingkaran yang tidak terlalu besar, menandakan bahwa penelitian dengan tema Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah belum banyak diteliti. Hal ini berarti, peneliti lain masih berpeluang untuk meneliti topik tersebut.

Dokumen yang dihasilkan dalam penelitian memiliki empat tipe, yakni *article*, *conference paper*, *review*, dan *book chapter*. Berikut ditampilkan visualisasi tipe dokumen penelitian collaborative governance bidang pembangunan sosial yang terpublikasi di Scopus.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah, Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No 34 Tahun 2000, jenis pajak kabupaten atau kota. Dalam buku (Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D ., 2017) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function).

Memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. (Mentari, 2022)

Pesatnya perkembangan industri pariwisata akan berimbas pada penerimaan yang diterima oleh daerah di sektor pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata

bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan retribusi objek wisata berupa karcis masuk ke obyek wisata.

Wisata yang dikelola dinas pariwisata kabupaten bulukumba sebanyak 10 objek wisata dengan tingkat kunjungan wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 206.970 jumlah wisatawan yang berkunjung di kabupaten Bulukumba, selanjutnya pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung kemudian bertambah dengan total sebanyak 266.348 pengunjung. Kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba kemudian bertambah setiap tahunnya dengan jumlah terbanyak saat ini pada tahun 2022 sebanyak 423.446 wisatawan

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba sebanyak 93 objek wisata yang dimiliki kabupaten Bulukumba yang dimana 9 diantaranya dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dan selebihnya dikelola BUMDES dan masyarakat setempat.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dari sekian banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba hanya ada beberapa wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan selebihnya di kelola oleh BUMDES dan masyarakat setempat. Berikut jumlah pemasukan pariwisata dalam tiga tahun terakhir; untuk tahun 2020 target sebanyak Rp. 2.574.700.000 dan yang terealisasi sebanyak Rp. 3.757.615.000 atau 145,94%, untuk tahun 2021 target sebanyak Rp. 6.000.000.000 dan yang terealisasi Rp. 5.968.870.000 atau 99,48%, dan untuk tahun

2022 target sebanyak Rp. 8.000.000.000 dan yang terealisasi Rp. 7.310.431.000 atau 91,38%.

Masih sangat banyak potensi PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba yang perlu digali dan dibenahi. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba harus dibenahi sehingga punya daya tarik demi peningkatan retribusi. PAD adalah salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Semakin besar PAD, semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan

Berdasarkan uraian telah dijelaskan sebelumnya untuk itu penulis berkesan untuk mengangkat penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan masalah penelitian sebagaimana dijelaskan diatas adalah;

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana faktor keberhasilan dalam implelementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam pendaptan asli daerah di Kabupatn Bulukumba ?

C. Tujuan Penulisan

Sementara adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu;

1. Menganalisis proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba.
2. Menganalisis faktor keberhasilan dalam implelementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam pendaptan asli daerah di Kabupatn Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang di uraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi civitas akademik mengenai Implementasi Kebijakan dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam rangka pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam fokus Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan positif pengelolaan pendapatan asli terkhusus pada Dinas Pariwisata dalam

pelaksanaannya terkait Optimalisasi Kebijakan dalam Implementasi kebijakan Pariwisata.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang strategi maupun penelitian tentang implmentasi kebijakan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah telah beberapa kali dilakukan, baik dari sudut Pandang Ilmu Administrasi Publik, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengawali penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian peneliti di atas. Hal ini penting untuk mengambil entry point penelitian, positioning penelitian serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya adalah:

No	Nama/Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Yanti & Hadya (2018), Implementasi Kebijakan Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang	Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggnakan analisis korelasi	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah pengunjung dan retribusi objek wisata mengalami peningkatan sedangkan jumlah UKM pariwisata cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2017. Kontribusi pendapatan objek wisata terhadap PAD kota Padang mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan

				stabil pada tahun 2017. Hasil analisis korelasi menunjukkan jumlah wisatawan, retribusi objek wisata memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Padang. Sedangkan jumlah UKM tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Padang
2	Pandita, dan Graha (2017) Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)	Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif milik Milles dan Huberman yang terdiri dari	Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, secara umum program dan kegiatan tahun 2014-2016 telah terealisasi dengan baik, walaupun ada beberapa program pengembangan tidak terimplementasi dengan baik. Terkait pada retribusi pariwisata terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi, realisasi pendapatan asli daerah telah melebihi target. Dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata tentu terdapat

			pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan	faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari potensi pariwisata yang beragam jenisnya, kebijakan kepala daerah yang berbasis kepariwisataan yang mampu mendorong semangat pembangunan pariwisata, serta adanya sumber daya anggaran yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kepemilikan lahan obyek wisata yang sebagian masih milik Perhutani, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pariwisata, dan fasilitas jalan yang jelek menuju obyek wisata
3	Anggraeni (2016), Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten	Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan desain riset yang digunakan yaitu deskriptif	Keputusan kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan, setiap Dinas diharuskan membuat Rencana Strategi untuk jangka waktu 5 tahun. Pernyataan kebijakan berupa Rencana Strategi kemudian dilegalkan melalui Perda tentang RPJMD 2010- 2015. Keluaran kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan ialah berupa event-

	Bintan Periode 2014-2015	Bintan Periode 2014-2015		event, pengembangan destinasi wisata serta objek wisata yang dapat dirasakan langsung oleh wisatawan maupun masyarakat. Hasil akhir kebijakan berupa keberhasilan dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan kedepannya untuk lebih aktif menggali potensi-potensi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Bintan serta lebih gencar dalam mempromosikan Pariwisata Kabupaten Bintan baik di dalam maupun di luar Negeri agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan
4	Aidil Fajri (2017) Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataan Dalam Rangka	untuk mengetahui Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data mengguna	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan informatisasi secara umum mendorong penggabungan dan koordinasi pariwisata dan pembangunan ekonomi regional. Informatisasi tidak hanya meningkatkan hubungan dan koordinasi

	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	(PAD) dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Qanun tersebut serta bagaimana cara mengatasinya	deskriptif kualitatif demi hasil yang di dapatkan melalui penelitian ini	pembangunan pariwisata dan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga memiliki efek limpahan spasial yang signifikan. Selain faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat informasi, keunggulan sumber daya pariwisata dan tingkat perkembangan ekonomi secara keseluruhan juga membantu meningkatkan tingkat keterkaitan dan koordinasi, sementara semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara perkotaan dan perdesaan terhambat secara terkoordinasi. perkembangan
5	Erna Rustiana (2019) Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut	Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah masalah. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain aksesibilitas masih kurang mendukung seperti jalan menuju lokasi wisata relatif kecil, sarana dan prasarana pada obyek wisata belum dikelola dengan baik

				dikarenakan keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang budaya sadar wisata dan manfaat dari pariwisata.
--	--	--	--	--

B. Teori dan Konsep

1. Kebijakan Publik

Menurut Chief J.O Udoji (1981) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016). mendefinisikan *Public Policy* sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga negara.

Menurut Robert Eyestone dalam bukunya (Taufiqurakhman, 2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

b.kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam bukunya (Anggara, 2016) *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, dalam kebijakan publik tidak jauh dari bagaimana skema sebuah kebijakan. Maksud dari proses kebijakan adalah perkembangan kegiatan ilmiah *intelektual* yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dasarnya bersifat *politis*, hal ini dijelaskan sebagai strategi dalam pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (William N Dunn, 2013, pp. 22–24), yang diuraikan berdasarkan tabel berikut:

NO	FASE	KARAKTERISTIK
1.	PENYUSUNAN AGENDA	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada rencana publik. Banyak masalah tidak ditangani oleh imajinasi apa pun, sementara yang lain ditunda cukup lama.
2.	FORMULASI KEBIJAKAN	Para pejabat perumuskan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Alternatif kebijakan melihat pentingnya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
3.	ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
4.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5.	PENILAIAN KEBIJAKAN	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai suatu kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. (Abdoellah & Rusfiana, 2016)

Menurut Erwan dan Dyah (2015:21) menyatakan bahwa implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk untuk mewujudkan kebijakan. (Anisa & Arifin, 2021)

Tachjan (2006:26) dalam (Anisa & Arifin, 2021) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan
- c. Target group atau kelompok sasaran.

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan. (Tachan, 2006)

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. (Tachan, 2006)

Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. (Tachan, 2006). Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,

keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Penjelasan implementasi menunjukkan tentang ruang lingkup kegiatan yang mengikuti penegasan rencana sehubungan dengan sasaran program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah (Winarno, 2016, p. 134).

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. (Tachan, 2006).

Dalam (Ansell et al., 2017:468) Sejumlah sarjana implementasi telah menyarankan bahwa memperbaiki rancangan kebijakan, menghubungkan perancang kebijakan dengan staf lini depan dan kelompok sasaran, dan meningkatkan pilihan instrumen kebijakan yang fleksibel adalah penting untuk menghindari kegagalan implementasi. Membangun dan mensintesakan serta memperluas saran-saran ini, kami bertujuan untuk menawarkan perspektif yang lebih komprehensif tentang masalah implementasi kebijakan, dengan alasan bahwa desain kebijakan kolaboratif dan implementasi kebijakan adaptif akan membantu pembuat kebijakan publik memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Untuk tujuan ini kami mengajukan serangkaian klaim yang saling berhubungan.

Dalam (Rodríguez et al., 2014 : 78) Implementasi menyiratkan keterkaitan antara kebijakan dan tindakan. Oleh karena itu, kebijakan dan implementasi pariwisata adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Penelitian

dari bidang kebijakan. menunjukkan bahwa pendekatan implementasi dapat dikategorikan secara luas menjadi tiga arketipe: 'top-down', 'bottom-up' dan 'interaktif' atau 'hybrid', dengan dua kategori pertama. sering digunakan dalam literatur pariwisata

Daniel Mazmanian dan Paul dalam (Pujiastuti et al., 2019) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Secara umum ada tiga pendekatan teoritis yang berbeda dalam studi implementasi.

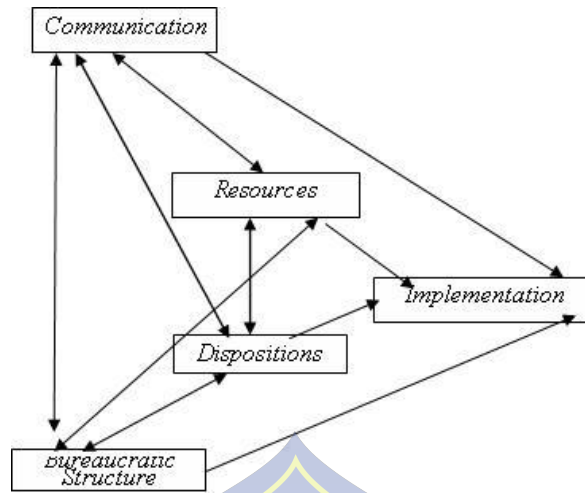
Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. (Akib, 2010)

Di dalam teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III (1980), dalam (Widiprana et al., 2017) suatu kebijakan publik akan sukses diimplementasikan jika melihat lebih dahulu pada dua pertanyaan, faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian dari dua pertanyaan ini dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi/pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi

Menurut Edward III (1980), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Edward III (1980) mengemukakan faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Disposisi menurut Edward III (1980) adalah “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III (1980) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit- unit organisasi dan sebagainya.

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut

Edward III:



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: Edward III (1980)

Menurut Quade (1984: 310), alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. (Akib, 2010)

Menurut (Nakamura & Smallwood, 1980). Dalam implementasi kebijakan melibatkan sejumlah sumber, termasuk di dalamnya manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. (Qodriyatun, 2019)

Implementasi model kebijakan menurut Grindle dalam bukunya Samodra Wibawa et al (1994) dalam (Syawal, 2022) Untuk mengukur

efektifitas suatu kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah sangat erat kaitannya dengan kualitas substansi atau kualitas isi kebijakan dan konteks pelaksanaan kebijakan tersebut, karena tujuan suatu kebijakan dilaksanakan pada hakikatnya untuk mendapatkan Perubahan atau peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah yang menjadi objek kebijakan Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi dua kelompok fenomena. Kedua kelompok fenomena tersebut adalah isi kebijakan dan konteks kebijakan

Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi sangat bergantung pada isi kebijakan, yaitu seberapa besar kepentingan yang terpengaruh, semakin besar kepentingan yang terpengaruh maka akan semakin sulit implementasinya. Demikian pula, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada jenis manfaat yang ingin dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Semakin nyata manfaat yang dihasilkan, semakin mudah penerapannya. Tingkat perubahan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Jika derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan itu besar dan luas, maka implementasinya akan lebih sulit. Begitu pula sebaliknya, jika derajat perubahannya kecil atau kecil, kebijakan tersebut mudah diterapkan (Syawal, 2022)

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara

perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

3. Kebijakan Pariwisata

Hall dan Jerkins dalam (Guo et al., 2019: 2) mulai mempelajari kebijakan pariwisata pada awal 1990-an dan mengusulkan kerangka konseptual penelitian kebijakan pariwisata. Hall dan Jenkins mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai perilaku pengambilan keputusan pemerintah di bidang pariwisata dan Goeldner mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai seperangkat pedoman yang secara langsung mempengaruhi perkembangan jangka panjang dan operasi sehari-hari suatu daerah tujuan wisata. Konsep kebijakan pariwisata bersifat ambigu, dan ruang lingkup penelitian kebijakan pariwisata cukup luas sehingga sulit untuk mengembangkan kerangka penelitian yang terpadu. Tidak ada definisi kebijakan pariwisata yang diterima secara umum.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mulai diperhitungkan sebagai sektor yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan

terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan juga terhadap perekonomian daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi pariwisata (Pandita, 2017) . Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pengembangan destinasi wisata yang ada di daerah di setiap daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan secara optimal seluruh elemen-elemen yang terkait industri pariwisata itu sendiri.(Tangian & Kumaat, 2020)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti kata Turisme sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sansekerta.

Jeffries (2001) berpendapat dalam (Zahra, 2010:84) bahwa potensi terbaik untuk mencapai kohesi dalam kebijakan pariwisata adalah pada tingkat pemerintah daerah. Otoritas lokal dianggap memiliki peran yang memungkinkan dalam hal implementasi kebijakan pariwisata. Kebijakan sektor publik pariwisata dapat bersifat mengatur dan mendukung. Contoh perangkat regulasi di tingkat lokal adalah kebijakan penggunaan lahan dan undang-undang. Mekanisme pendukung dapat mencakup mendorong kemitraan sektor swasta publik dan pendanaan

Literatur perencanaan pariwisata menekankan peran pemerintah daerah terutama untuk koordinasi integrasi dan konsultasi masyarakat. Salah satu

tugas pemerintah daerah adalah melindungi hak-hak masyarakat lokal terhadap kepentingan pemerintah pusat dan swasta.

Dalam (Keller, 2015) kebijakan pariwisata saat ini merupakan kebijakan ekonominya sendiri, dengan struktur pemerintahan dan administrasi yang mapan namun ramping. Pertukaran pengalaman antar pemerintah di OECD, wadah pemikir kebijakan ekonomi dunia Barat, menghasilkan semacam pemahaman tentang instrumen promosi pariwisata yang sesuai dengan prinsip ekonomi pasar. Itu Negara anggota OECD, termasuk organisasi pemasaran tujuan yang baru dilembagakan “Brand USA”, didirikan dan masih mendukung promosi tujuan negara mereka. Beberapa negara mendukung juga infrastruktur terkait pariwisata dan fasilitas akomodasi. Selain itu, beberapa merangsang inovasi dan kerjasama industri terkait pariwisata mereka.

Dalam (Ye et al., 2012:973) Industri pariwisata telah ditempatkan dalam lingkungan yang berpotensi rapuh, dan telah menjadi salah satu faktor utama pembentuk lanskap. Untuk meningkatkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, ada kebutuhan untuk fokus pada efek negatif pariwisata terhadap lingkungan dan menetapkan kebijakan relatif untuk merumuskan pengembangan pariwisata.

Menurut Yoeti, (1996:112) dalam Bukunya (Suwena & Widyatmaja, 2010). Sesungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata. Secara

etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau “tourism”.

Dalam (Almeida-García, 2018:3) kebijakan pariwisata berpusat pada negara-negara tertentu, sebagai bagian dari kebijakan nasional mereka. Pencapaian pembangunan sosial ekonomi melalui pariwisata bergantung pada berbagai elemen dan situasi di luar kendali industri itu sendiri. Berbagai macam faktor memainkan peran kunci dalam proses ini, konteks ekonomi, sosial, politik, geografis dan teknologi, atau lingkungan di mana pariwisata berkembang. Sebagian besar penelitian setuju bahwa tingkat pembangunan suatu negara, ukuran geografisnya, tingkat pertumbuhan pariwisata, tingkat adaptasi sosial terhadap perubahan, intervensi negara dan adanya perencanaan pariwisata merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Bukunya (Ismayanti, 2020) Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
5. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBD, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. (I Gede Putu Aryadi, S.Sos. et al., 2019)

Menurut Bastian (2001:22) dalam (Fajri, 2017) bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan akumulasi dari pos penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos penerima Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pendapatan

Menurut UU No 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah Insukindro

Dalam Bukunya (I Gede Putu Aryadi, S.Sos. et al., 2019) Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sementara itu pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Peran sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah baik dalam kondisi jangka pendek maupun jangka panjang yang disertai dengan variabel kontrol. Selain itu, beberapa indikator pariwisata membantu memberikan opsi permanen untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kajian ini mengkaji kembali peran sektor pariwisata dalam kontribusi pendapatan asli daerah (Laut et al., 2021:833)

Menurut Insukindro, dkk.(1994) dalam (Horota et al., 2017) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, maka salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD.

Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut;

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

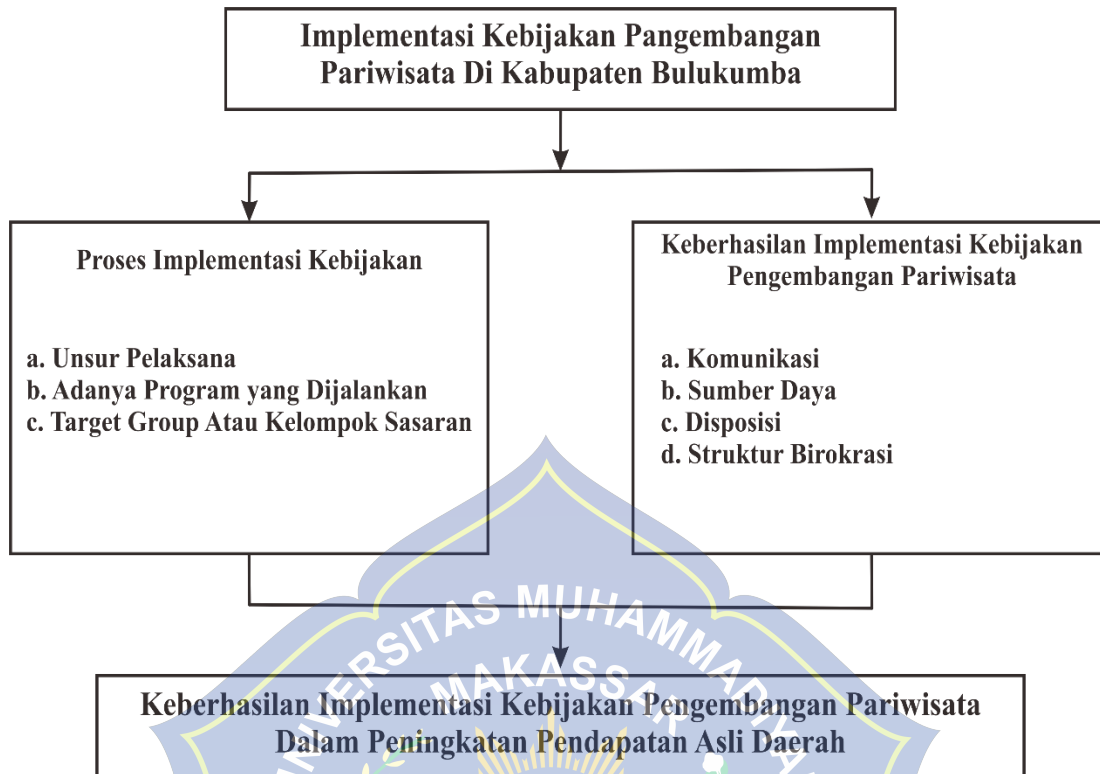
Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah

penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumberdaya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. (Horota et al., 2017)

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini terkait Implementasi Kebijakan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini akan mengamati proses Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Mengemukakan bahwa proses Implementasi Kebijakan: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Sikap Birokrasi/Pelaksana; (4) Struktur Organisasi.

Dari penggambaran di atas, dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dari model implementasi kebijakan Edward III dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.3
Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Edward III.

E. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan pemahaman tentang fokus penelitian, maka masing-masing diuraikan sehingga nampak lebih jelas maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini. Deskripsi fokus penelitian ini adalah :

Implementasi Kebijakan:

1. **Komunikasi** dalam implementasi kebijakan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba ialah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana atau stakeholder yang terlibat dimana pelaksana disini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Untuk mengukur indikator komunikasi di perlukan sub indikator transmisi agar penyampaian informasi tersampaikan dengan baik
2. **Sumber Daya** dalam implementasi kebijakan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik sector pariwisata khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
3. **Sikap Birokrasi** dalam implementasi kebijakan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bulukunba yaitu Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana

bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan di awal khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

4. **Struktur Birokrasi** dalam implementasi kebijakan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba yaitu salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
1	Komunikasi	Transmisi	Penyampaian informasi yang baik, agar kebijakan tidak hanya disampaikan kepada para implemtor akan tetapi bisa diterima oleh kelompok sasaran	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Kejelasan informasi	Setelah kebijakan di transmisikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas maka masing-masing mengetahui apa maksud, tujuan dari kebijakan yang diimplemetasikan sehingga		

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
			mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan kebijakan agar efektif.		
		Konsistensi	Agar kebijakan tidak berubah-ubah, jika kebijakan tidak konsisten yang maka dapat membingungkan pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak optimal.		
2	Sumber Daya	Sumber daya manusia	Pelaksana dari sebuah kebijakan yang memadai dan kompeten sesuai dengan bidang yang diperlukan	Observasi, Wawancara mendalam dan mendapatkan data terupdate dan valid	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Sumber daya Financial	Unsur paling penting berupa dana untuk memenuhi semua kebutuhan kebijakan agar dapat terimplementasikan sesuai dengan tujuan.		
		Sumber daya Material	Unsur sumber daya yang bersifat fisik seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan		

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
			program kebijakan pariwisata		
		Sumber daya informasi	Data kepatuhan para pelaksana akan hukum dan aturan pemerintah, serta umpan balik yang diberikan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan pariwisata		
3	Disposisi	Pengangkatan birokrasi	Saat pemilihan dan pengangkatan pegawai pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi dan hasrat yang kuat serta komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan, terutama untuk kepentingan masyarakat	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Insentif	Memberikan insentif berupa penambahan keuntungan atau biaya untuk para pelaksana khususnya kepada pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat pada diri		

No	Dimensi	Sub Dimensi	Definisi Sub Dimensi	Cara Ukur	Alat Ukur
			maupun organisasi untuk tercapainya tujuan kebijakan.		
4	Struktur birokrasi	<i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i>	Struktur paling dasar dalam sebuah organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dan digunakan pegawai atau para pelaksana kebijakan sebagai dasar kegiatan sehari-hari	Observasi, Wawancara mendalam	Pedoman Wawancara disertai observasi secara detail
		Fragmantasi	Penyebaran tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dengan melibatkan organisasi luar tanpa adanya tumpang tindih		

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan, di daerah Kabupaten Bulukumba. Difokuskan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba serta instansi terkait. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pariwisata serta kemudahan dalam mengumpulkan data karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memperoleh gambaran faktual tentang Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Maka jenis penelitian yang tepat digunakan adalah penelitian kualitatif, karena dapat menjelaskan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat serta sesuai dengan kondisi pelaksanaan kebijakan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus (*case study*) yang berfokus terhadap satu objek dengan mempelajari suatu kasus. Penelitian ini akan memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja, tapi juga meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari

data tersebut. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena berdasarkan masalah yang terjadi, sehingga dibutuhkan analisis terhadap suatu kasus yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yakni: data primer dan data sekunder. Berikut dijelaskan secara rinci:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yang belum di kelola. Cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam di lokasi penelitian. Adapun bentuk data primer berupa: rekaman dan catatan hasil wawancara bersama informan, hasil observasi lapangan, dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, dan data mengenai informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia dan telah diolah. Data sekunder dapat berupa laporan yang telah diolah dan tersusun dalam arsip, seperti buku, jurnal, laporan, dll. Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yakni rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, sumber anggaran terkait cakupan program, buku implementasi kebijakan, dan data lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Informan Penelitian

Pemilihan sumber dalam pengujian ini menggunakan pengujian purposive. Secara khusus, metode pemeriksaan dengan sengaja, dengan alasan atau alasan tertentu, menerima bahwa saksi yang dipilih memiliki data yang diperlukan untuk dilengkapi oleh penulis. penulis ini memutuskan saksi-saksi tertentu, yang tentunya berharap bahwa sebagai narasumber dapat memberikan data yang benar- benar mendelegasikan (Syawal, 2022). Informan penelitian yang dimaksud adalah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, diantaranya:

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bukunya (Barlian, 2016) Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Media Review. Berikut dijelaskan secara rinci:

1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara mendalam terkait Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bulukumba. Observasi ini berfungsi untuk melengkapi dan menyaring data yang tidak memungkinkan untuk diperoleh melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Peneliti akan melakukan tanya jawab secara tatap muka dengan mendalam bersama informan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi, berbentuk visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun tujuan menggunakan metode ini yaitu, untuk memperoleh data secara jelas dan konkret mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.

4. Media Review

Penelitian ini akan melakukan review terhadap pemberitaan, baik yang Implementasi Kebijakan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memperoleh data riil yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui teknik lain.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, dalam bukunya (Siyoto & Sodik, 2015) proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Data yang didapatkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Adapun tahap teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong dalam (Siyoto & Sodik, 2015) adalah, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalan data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi

juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Keabsahan Data

Dokumen informasi atau data yang telah didapatkan, diusahakan menciptakan hasil yang berkualitas, untuk itu validasi data dalam sebuah penelitian penting untuk

mendukung hasil akhir penelitian. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memvalidasi data, yaitu dengan proses triangulasi terbagi menjadi tiga macam teknik yaitu, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Teknik ini membandingkan data dengan mengecek ulang informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara informan satu dengan hasil wawancara informan lainnya serta membandingkan hasil wawancara dengan dengan dokumen yang ada. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulukumba. Peneliti akan membandingkan hasil wawancara, data yang diperoleh melalui media sosial dengan pengamatan langsung di lapangan, baik dari perspektif internal maupun eksternal.

2. Triangulasi Teknik

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda untuk menguji kredibilitas data. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya di cek melalui observasi dan dokumentasi. Jika terdapat hasil yang berbeda, maka penulis akan melakukan diskusi kepada informan yang dimaksud guna memastikan kebenaran sebuah data. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik yang berbeda untuk memperoleh informasi terkait Implementasi Kebijakan Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulukumba sehingga dapat memastikan keakuratannya.

3. Tringulasi Waktu

Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan pengecekan berulang-ulang terhadap berbagai sumber yang dilakukan pada waktu dan cara yang berbeda untuk mendapatkan data yang akurat. Waktu sangat menentukan kredibilitas data karena data yang dikumpulkan pada pagi hari belum tentu sama dengan hasil data yang dikumpulkan pada sore ataupun malam hari. Untuk itu, dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan secara berulang pada waktu yang berbeda demi mendapatkan data yang kredibilitas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31, Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan. Adapun visi dan misi Dinas Pariwisata mengikuti visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni:

1) Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

Telaahan Visi tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat produktif

Masyarakat produktif adalah masyarakat mandiri yang mampu melakukan inovasi sehingga menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan kreatifitas masyarakat dalam

menghasilkan sebuah produk dengan mengelola dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat produktif dengan lebih mengutamakan ekonomi mikro akan memberi ransangan kepada masyarakat untuk giat menggerakkan roda ekonominya dengan bantuan dari pemerintah.

2. Menggapai masyarakat Bulukumba yang sejahtera. Tujuan utama dari visi ini adalah masyarakat yang sejahtera sebagai sebuah titik kulminasi. Pencapaian masyarakat sejahtera adalah cita-cita negara secara politik dan sosial, pada konteks ini diperlukan konsepsi pembangunan yang simultan. Salah satu faktor pendukung adalah mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada dengan menjadikan Bulukumba sebagai daerah agroindustri, agrobisnis, dan daerah tujuan wisata baik bahari (maritim) maupun adat dan budaya, melalui peningkatan ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan pelayanan jasa.
3. Pemanfaatan secara maksimal potensi sumber daya lokal. Bulukumba memiliki sumber daya lokal baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat memadai. Hal ini perlu dimanfaatkan secara optimal seperti : potensi sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan sehingga memerlukan strategi penanganan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

2) Misi

Dari rumusan visi di atas maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat;
- b. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik;
- c. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor;
- d. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional;
- e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal;
- f. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;
- g. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara;
- h. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat;
- i. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;
- j. Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme;
- k. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- l. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan.

Mencermati kedua belas misi tersebut di atas, maka yang berkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba adalah ada pada Misi Kedua, ketujuh dan kesepuluh dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi Kedua dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bulukumba adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik. Misi ini mencakupi upaya-upaya untuk membuat perencanaan penganggaran sampai dengan evaluasi dan pelaporan dibuat secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan agar supaya terjadi peningkatan dalam Penilaian/Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Misi ketujuh yaitu Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara merupakan program kerja prioritas urusan kepariwisataan. Pengembangan destinasi wisata merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan. Puluhan event pariwisata bertaraf local, nasional, dan international akan dilakukan untuk menarik minat wisatawan ke Bulukumba, dan melakukan promosi secara massive pada seluruh media online dan offline. Selain itu Pengembangan kapasitas Sumber Daya Pariwisata juga terus dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan kepariwisataan.

Sedangkan pada misi kesepuluh adalah Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme. Misi ini

mencakupi upaya-upaya yang maksimal dari berbagai stakeholders untuk menggali semua potensi bidang kepemudaan dan keolahragaan sehingga muncul banyak atlet berbakat dan berprestasi serta muncul pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif dan berjiwa wirusaha.

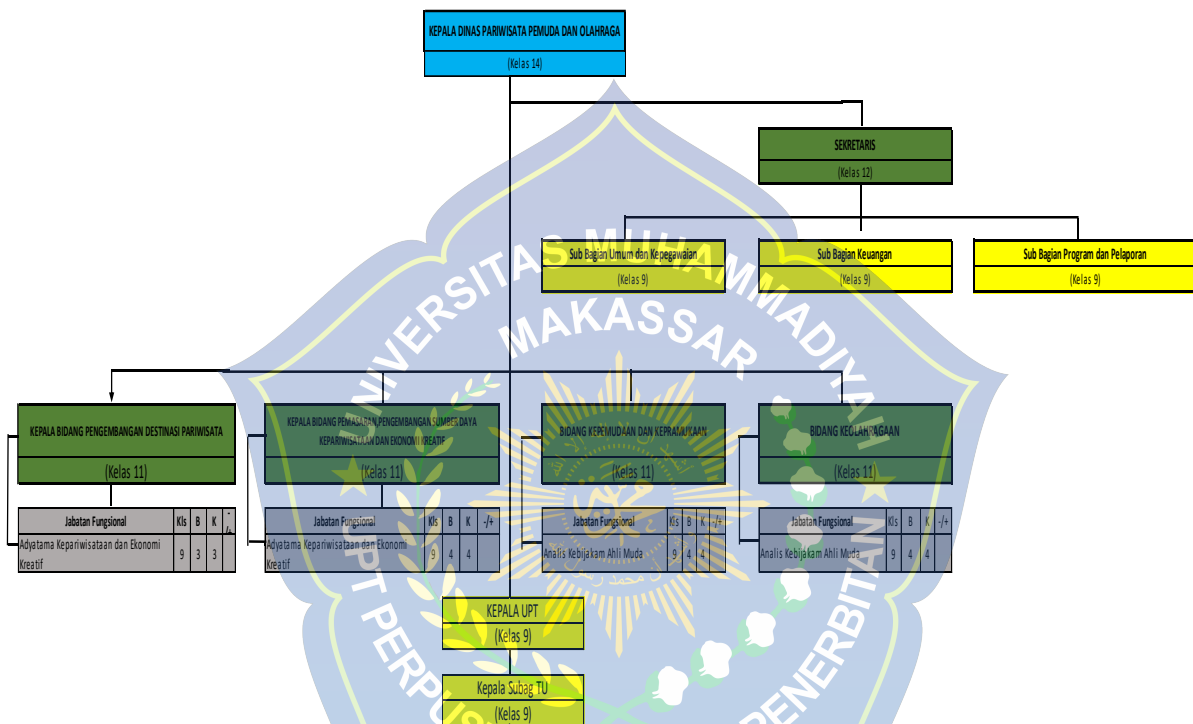
Selain itu upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber daya pemuda dan pelaku olahraga baik itu atlet, pelatih, pembina, perangkat pertandingan dan lain-lain melalui berbagai macam pelatihan, seminar, sekolah olahraga, lomba-lomba dan kompetisi serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan representative.

Dari misi diatas dapat ditelaah bahwa Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan memfasilitasi pengembangan Kepariwisata, Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bulukumba yang produktif dan mandiri untuk pertumbuhan pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Selain itu, akan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel berlandaskan pada nilai kearifan local.

2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulukumba



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA



3. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan wilayah yang terletak di bagian ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara geografis terletak diantara koordinat 5°20' LS - 5°40' LS dan 119°58' BT - 120°28' BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Bulukumba adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Adapun penjelasan diatas terlihat pada gambar 4.2, sebagai berikut:



Sumber : bulukumbakab.go.id

Gambar 4.1: Peta Kabupaten Bulukumba

B. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata merupakan Salah satu tujuan utama dari kebijakan pariwisata adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian di Kabupaten Bulukumba. Dengan menarik wisatawan, dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendiversifikasi ekonomi, dan

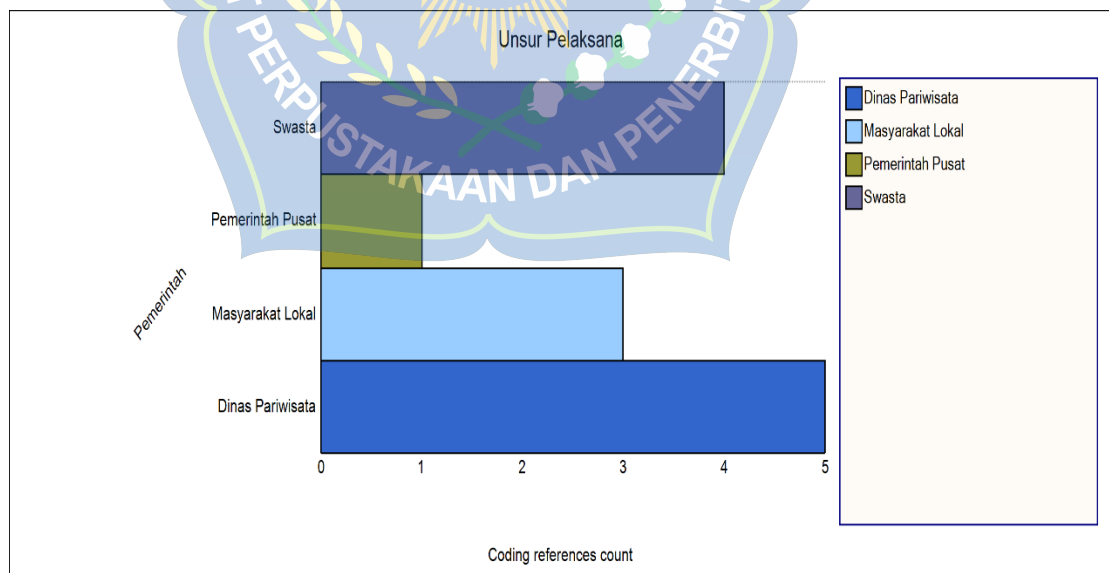
meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, pungutan pariwisata, dan belanja wisatawan.

1. Proses Impelementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Untuk mengukur bagaimana proses suatu implementasi kebijakan Pariwisata dilakukan menggunakan teori Tachjan melalui tiga variable berikut :

a. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dapat diartikan Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan public dengan unit birokratik sebagai actor pelaksana. Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan. Berikut uraian aplikasi Nvivo plus 12 yakni:



Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo Pulu 12 untuk mendapatkan hasil perbandingan unsur pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan unsur pelaksana menurut pemerintah daerah terbagi menjadi 4 pelaksana implementasi kebijakan. Hasil ini diperoleh dari informan yang juga terlibat dan data tersebut sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di tingkat pemerintahan di Bulukumba, tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan publik di sektor pariwisata dapat dibagi antara beberapa pihak yang berperan penting Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba: Komunitas Lokal dan Pemangku Kepentingan, Swasta dan Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat Umum:” (Hasil Wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Informan FF mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata memerlukan unsur pelaksana yang saling berkesinambungan antara satu sama lain mulai dari pemerintah pusat hingga ke masyarakat local dan pelaku usaha kepariwisataan.

Informan FF Juga mempertegas dengan memberikan pernyataan seperti uraian berikut:

“Sebagai pelaksana birokratik di sektor pariwisata, peran kami sangatlah vital. Kami bertanggung jawab untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, kami juga harus memastikan

bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan efisien dan efektif demi kemajuan pariwisata di Bulukumba. Sebagai birokratik, kami bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata. Hal ini meliputi pemetaan potensi pariwisata daerah, membantu dalam proses perencanaan dan pengembangan infrastruktur pariwisata, serta memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti investor, masyarakat lokal, dan lembaga terkait. Dengan melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik, kami dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pariwisata di Bulukumba.” (Hasil Wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dalam pernyataannya mempertegas bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab penuh dalam proses implementasi kebijakan juga menyusun program-program yang dijalankan serta mengawasi secara langsung kebijakan yang sedang di jalankan dan memastikan apakah kebijakan sudah sesuai dengan peruntukannya sebagai salah satu indikator peningkatan ekonomi masyarakat yang juga secara tidak langsung sebagai salah satu pemasukan bagi daerah dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan MA selaku pelaksana dari kebijakan pengembangan pariwisata dalam hal ini sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Uraian pertnyataanya sebagai berikut:

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba, tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan publik di sektor pariwisata pada tingkat pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa pihak yang saling terkait dan berperan penting. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Swasta dan Pengusaha Pariwisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pusat” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pelaksana yang paling bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Tetapi hal ini juga harus di dukung oleh masyarakat kabupaten bulukumba dan pihak swasta dan juga dibutuhkan koordinasi anatar para pelaksana guna keberhasilan proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Bulukumba.

Hal tersebut senada dengan pernyataan informan R selaku Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa :

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba, tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan publik di sektor pariwisata pada tingkat pemerintahan bisa terbagi kepada beberapa pihak, yaitu: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Pelaku Industri Pariwisata di Bulukumba, Instansi terkait lainnya, Terkadang, implementasi kebijakan pariwisata melibatkan instansi-instansi lain seperti Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Koordinasi antara berbagai instansi ini menjadi penting untuk mencapai tujuan pariwisata yang lebih komprehensif dan berkelanjutan”(Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab utama dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan melakukan kerjasama dengan dinas lainnya terkait pelaksana implementasi kebijakan seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan sebagainya, diperlukan

koordinasi yang baik antara dinas tersebut guna tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

Begitu pula dengan Informan IA sebagai Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

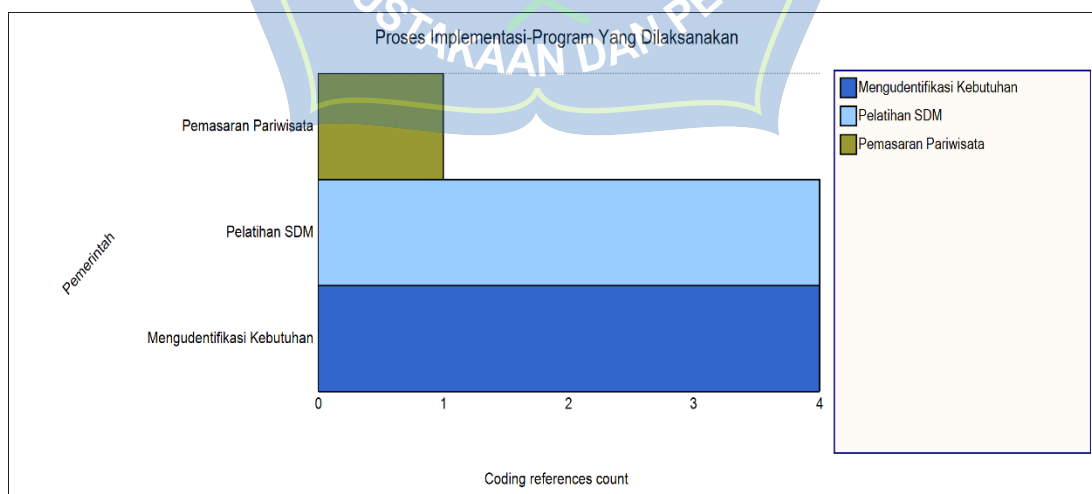
“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba, tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan publik di sektor pariwisata pada tingkat pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa pihak yang saling berperan: Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Bulukumba): Dinas Pariwisata: Komunitas Lokal dan Masyarakat”(Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan informan IA juga mempertegas bahwa yang menjadi pelaksana utama untuk proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten bulukumba adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba bersama dengan masyarakat lokal.

Berdasarkan beberapa uraian di atas pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba menjadi pelaksana utama dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pariwisata dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi selatan maupun pemerintah pusat dan juga pihak swasta begitu juga dengan masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam proses implementasi kebijakan pariwisata.

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program-program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan proyek spesifik yang didesain untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Program-program ini merupakan bagian integral dari proses implementasi yang berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan. Penting untuk diingat bahwa program-program ini perlu diawasi secara ketat selama implementasinya dan dapat mengalami penyesuaian jika diperlukan. Proses implementasi kebijakan sering kali kompleks dan dapat melibatkan berbagai tantangan, oleh karena itu, peran pemantauan, evaluasi, dan responsif dalam perbaikan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*.



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil proses implementasi berdasarkan variable program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh dari informan yang juga terlibat sebagai pelaksana implementasi kebijakan dan data tersebut sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan I selaku Adyatama Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Menyusun program pelatihan dan sertifikasi pariwisata yang mudah dipahami dan diikuti oleh para peserta merupakan hal penting dalam menerapkan kebijakan pariwisata Bulukumba. Berikut beberapa poin yang bisa dijadikan pedoman, Penetapan Tujuan yang Jelas, Program pelatihan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Pertimbangkan kebutuhan dan keinginan peserta serta sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan pariwisata Bulukumba. Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami, Dalam penyusunan materi pelatihan, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Dukungan dan Bimbingan: Pastikan ada sistem dukungan dan bimbingan untuk peserta selama dan setelah pelatihan”. (Hasil Wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Informan I mengemukakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata didahului dengan menyusun program pelatihan dan sertifikasi pariwisata untuk peningkatan sumber daya manusia yang ingin melaksanakan kebijakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi berapa kebutuhan yang ingin dicapai dalam kebijakan pariwisata Bulukumba dan juga harus mempertahankan beberapa poin penting seperti penetapan tujuan yang jelas,

program pelatihan harus memiliki tujuan yang jelas sehingga proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan FF selaku pelaksana dari kebijakan pengembangan pariwisata dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Uraian pertnyataanya sebagai berikut:

“Dalam menghadapi kebijakan pariwisata di Bulukumba, kami telah merancang program pelatihan dan sertifikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para peserta dalam memahami dan mengikutinya. Berikut beberapa langkah yang kami lakukan untuk mencapai hal tersebut, Analisis Kebutuhan, Penggunaan Bahasa yang Sederhana, Penggunaan Media Interaktif”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa program yang dijalankan dalam proses implementasi kebijakan yaitu pelatihan sumber daya manusia dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan yang mendalam dengan memperhatikan penggunaan Bahasa yang mudah dipahami atau yang bisa diterima oleh peserta pelatihan.

Hal senada juga disampaikan oleh informan MA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk menciptakan program pelatihan dan sertifikasi pariwisata yang mudah dipahami dan diikuti oleh para peserta, ada beberapa langkah dan strategi dapat diambil dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba yang pertama menetapkan target peserta berdasarkan latar belakang, tingkat pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk setiap program pelatihan. Melibatkan pihak terkait, seperti pelaku industri pariwisata lokal, akademisi, dan pemerintah daerah,

dalam menyusun program pelatihan akan membantu memastikan relevansi dan kualitas program”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia terlebih dahulu menentukan target yang peserta berdasarkan latar belakang, tingkat pengetahuan, dan keahliannya. Dan juga dalam pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia harus melibatkan stakeholder yang mumpuni dalam bidang pariwisata seperti akademisi atau pelaku industry kepariwisataan.

Selain beberapa pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan IA selaku Kepala Bidang Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran dari program pelatihan dan sertifikasi pariwisata. Pertimbangkan latar belakang dan tingkat pengetahuan peserta potensial, serta tugas dan tanggung jawab yang relevan dengan industri pariwisata di Bulukumba. Konsultasi dengan Pihak Terkait, Melibatkan pihak terkait seperti pelaku industri pariwisata, perwakilan pemerintah, dan akademisi dapat memberikan wawasan berharga tentang tren terkini dalam industri, keterampilan yang diperlukan, dan isu-isu khusus yang harus ditangani. Dengan melakukan konsultasi, program dapat lebih relevan dan tepat sasaran”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sama halnya dengan beberapa informan lainnya bahwa dalam program kebijakan pariwisata terdapat beberapa langkah yang dimana terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan latar belakang dan tingkat kepatuhan dari masing-masing peserta.

Informan IA juga menelaskan program lain yang dilaksanakan dengan memberikan pernyataan seperti uraian berikut:

“Menurut saya, ada beberapa elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam perancangan program pemasaran destinasi pariwisata di Bulukumba. Pertama, harus ada tujuan yang jelas dan terukur dari program tersebut. Misalnya, apakah program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, atau mempromosikan objek wisata tertentu di daerah kita. Selain itu, target audiens dari program pemasaran harus juga dipahami dengan baik. Siapa target pasar utama yang ingin kita tarik, dan bagaimana cara mencapainya dengan efektif. Dengan memahami target audiens, kita bisa menyesuaikan pesan pemasaran agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan wisatawan potensial. program pemasaran destinasi pariwisata harus selaras dengan tujuan kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan. Jadi, dalam perancangan program ini, perlu ada keterkaitan yang jelas antara pesan pemasaran dengan nilai-nilai dan visi pariwisata di Bulukumba. Misalnya, jika salah satu tujuan kebijakan pariwisata adalah meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata, maka pesan pemasaran harus menonjolkan keunikan budaya dan adat istiadat setempat yang akan menarik minat wisatawan.”

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan program kebijakan diperlukan program pemasaran destinasi pariwisata dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasarannya sehingga program ini bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dari wisatawan local, domestic atau mancanegara, dan dari program ini pula kita bisa melihat peningkatan pendapatan dari segi ekonomi masyarakat agar pendapatan asli daerah bisa meningkat.

Informan R selaku Kepala Bidang Pengembangan Pengembangan Pariwisata juga menjelaskan tentang program yang dilaksanakan sebagai berikut:

“Untuk membuat program pemasaran destinasi pariwisata yang mudah dipahami oleh pihak industri pariwisata di Bulukumba, beberapa hal perlu diperhatikan Komunikasi yang jelas Program harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas bagi semua pihak terkait. Tujuan yang terukur Program pemasaran harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, sehingga para pelaku industri pariwisata dapat dengan mudah menilai dampak dari program tersebut terhadap bisnis mereka. Materi promosi yang menarik Materi promosi seperti brosur, video, konten online harus menarik dan mencerminkan daya tarik unik destinasi pariwisata di Bulukumba atau membuat event berskala daerah atau nasional seperti festival pinis, jelajah hutan karet dan santai di Bira” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

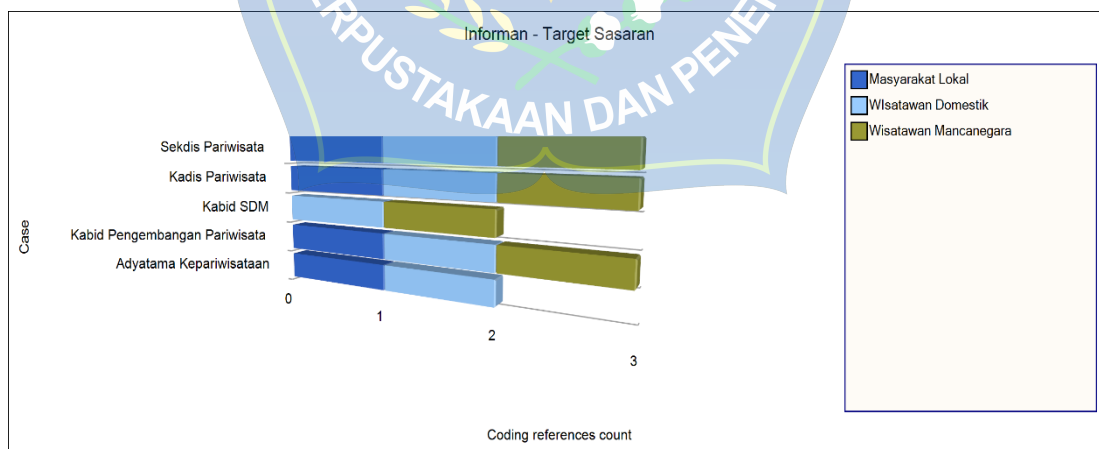
Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan program pemasaran diperlukan tujuan yang jelas dan terukur agar target atau sasaran dari kebijakan dapat memahami dengan mudah maksud dan tujuan dari kebijakan pariwisata, dengan menggunakan media promosi seperti brosur, video destinasi wisata, atau konten tentang wisata Bulukumba yang dimana bisa diterima oleh hampir semua kalangan masyarakat atau pelaku industry pariwisata.

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang utama dalam proses implelementasi kebijakan penembangan pariwisata adalah terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan yang ingin digunakan selanjutnya mengadakan perekrutan sumber daya manusia agar menjadi pelaksana kebijakan yang kompeten guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yang diinginkan. Dengan melibatkan stakeholder yang mumpuni dalam bidang pariwisata seperti akademisi dari politeknik pariwisata makassar. Dalam program kebijakan diperlukan pemasaran pariwisata yang baik agar menarik wisatawan datang ke

Kabupaten Bulukumba dan pastinya hal tersebut berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat yang meningkat dan daerah pun mendapat pemasukan dari pajak restribusi wisata, pajak hotel, pajak restoran. Hal tesebut juga secara tidak langsung meningkatnya pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba.

c. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Kelompok sasaran ini adalah mereka yang dianggap akan mendapatkan manfaat langsung atau menjadi subjek utama dari kebijakan pariwisata yang dijalankan. Identifikasi kelompok sasaran yang tepat sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang diharapkan. Berikut hasil analisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 :



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil proses implementasi berdasarkan variable target sasaran dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di daerah Bulukumba, kami telah mengidentifikasi beberapa kelompok sasaran yang menjadi fokus utama. Kelompok sasaran tersebut meliputi: Pariwisata Alam: Kami berupaya menarik wisatawan yang tertarik dengan pesona alam Bulukumba, seperti pantai-pantai indah, pulau-pulau eksotis, gunung, dan objek wisata alam lainnya. Kelompok sasaran ini biasanya terdiri dari penggemar kegiatan seperti snorkeling, selam, hiking, dan kegiatan berwisata alam lainnya. Pariwisata Budaya: Bulukumba memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam. Kami berusaha menarik wisatawan yang tertarik dengan budaya lokal, seperti upacara adat, tarian tradisional, kerajinan tangan, dan festival budaya”.(Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa daalam mengidentifikasi kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan terlebih dahulu mengkalisifikasikan kelompok wisata. Diantaranya pariwisata alam seperti pantai, goa, pulau-pulau, dan gunung, yang dimana target utamanya wisatawan local, domestic bahkan mancanegara. Selain itu ada juga wisata budaya yang dimana menyajikan budaya local, upacara adat, tarian tradional dan kerajinan tangan,

wisata budaya dapat ditemukan pada suku Kajang di Kecamatan Kajang. Dan tentunya menyasar wisatawan domestic, local hingga mancanegara.

Selain pernyataan diatas terdapat pula pernyataan dari informan MA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Uraianya sebagai berikut:

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba, kelompok sasaran dari kebijakan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berperan penting dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. beberapa contoh kelompok sasaran dari kebijakan pariwisata yang sedang dijalankan di Bulukumba, Wisatawan Domestik Kelompok ini mencakup warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata ke Bulukumba dari berbagai daerah di dalam negeri. Wisatawan Asing Kelompok ini mencakup wisatawan dari luar negeri yang datang ke Bulukumba untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat setempat. Masyarakat Lokal Kelompok ini merupakan bagian integral dari keberhasilan kebijakan pariwisata”.

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan yaitu ada tiga target utama diantaranya adalah wisatawan local yang dimana wisatawan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bulukumba atau di Kabupaten sekitar Bulukumba, wisatawan Domestik yang dimana wisatawan ini adalah yang mencakup warga negara Indonesia, dan wisatawan mancanegara yang dimana wisatawan ini adalah warga negara asing dari berbagai negara.

Hal senada juga diuraikan oleh informan IA selaku Kepala Bidang Pemsaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Uraianya sebagai berikut:

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa kelompok sasaran yang menjadi fokus utama. Wisatawan Domestik Pariwisata dalam negeri merupakan potensi yang sangat penting untuk daerah Bulukumba. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata diarahkan untuk menarik minat wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di Bulukumba. Wisatawan Mancanegara Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga menjadi tujuan dalam kebijakan pariwisata. Dengan memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata yang unik dan menarik di Bulukumba, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah kunjungan dari wisatawan internasional, seperti dari negara-negara Asia, Eropa, dan lainnya. Masyarakat Lokal Keterlibatan dan dukungan dari masyarakat lokal sangat penting dalam keberhasilan kebijakan pariwisata. Dalam implementasinya, kebijakan ini juga berusaha untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pariwisata juga menjadi perhatian dalam kebijakan ini”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan sumber daya manusia yang ahli atau mumpuni dalam bidang pariwisata karena target sasaran dalam kebijakan ini ada tiga salah satunya wisatawan mancanegara dari berbagai negara yang tentunya berbeda Bahasa dan budaya yang ada di Bulukumba selain itu ada juga wisatawan domestic yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang berbeda budaya, selain dari itu dibutuhkan juga dukungan dari masyarakat local guna pengembangan potensi pariwisata di Bulukumba.

Informan IA juga mempertegas dengan memberikan pernyataan seperti uraian berikut:

“Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pariwisata: Kami akan terus meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, termasuk

aksesibilitas, jalan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas lainnya yang akan memudahkan wisatawan internasional untuk berkunjung ke Bulukumba. Partisipasi dalam Pameran dan Event Pariwisata: Dalam upaya memperluas jaringan dan meningkatkan visibilitas destinasi kami, kami akan berpartisipasi dalam pameran dan event pariwisata internasional. Ini akan memberi kami kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelaku industri dan calon wisatawan. Sehingga semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung maka secara tidak langsung pendapatan daerah akan meningkat”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa selain target yang harus ditetapkan harus juga diimbangi oleh peningkatan infrastruktur pariwisata guna memudahkan para wisatawan berkunjung ke Bulukumba, seperti membangun jalan, pelabuhan, serta hotel dan restoran. Jika semakin banyak wisatawan yang datang ke Bulukumba maka pendapatan daerah pun akan meningkat.

Informan I selaku Adyatama Kepariwisataan juga mengemukakan target sasaran dari implementasi kebijakan pariwisata sebagai berikut:

“Saat ini, kebijakan pariwisata di Kabupaten Bulukumba ditujukan kepada beberapa kelompok sasaran utama yang kami harapkan dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan industri pariwisata di daerah ini. Wisatawan Lokal Kami berupaya meningkatkan minat dan partisipasi wisatawan dari masyarakat lokal. Ini termasuk penduduk di sekitar destinasi wisata di Bulukumba dan wilayah-wilayah terdekat. Wisatawan Nusantara Kami ingin menarik minat wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengunjungi Bulukumba. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata memfokuskan menarik wisatawan lokal yang berasal dari sekitar wilayah wisata, wisatawan nusantara yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang tentunya

dengan melakukan promosi wisata yang menarik yang dapat menarik minat wisatawan datang berkunjung.

Berdasarkan semua pernyataan diatas yang mengenai target sasaran dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 fitur *Crosstab* sebagai berikut:



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dalam menjalankan kebijakan pariwisata dengan menetapkan target sasaran, wisatawan domestic menjadi target yang utama diikuti oleh wisatawan local dan mancanegara.

2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengebangan Pariwisata

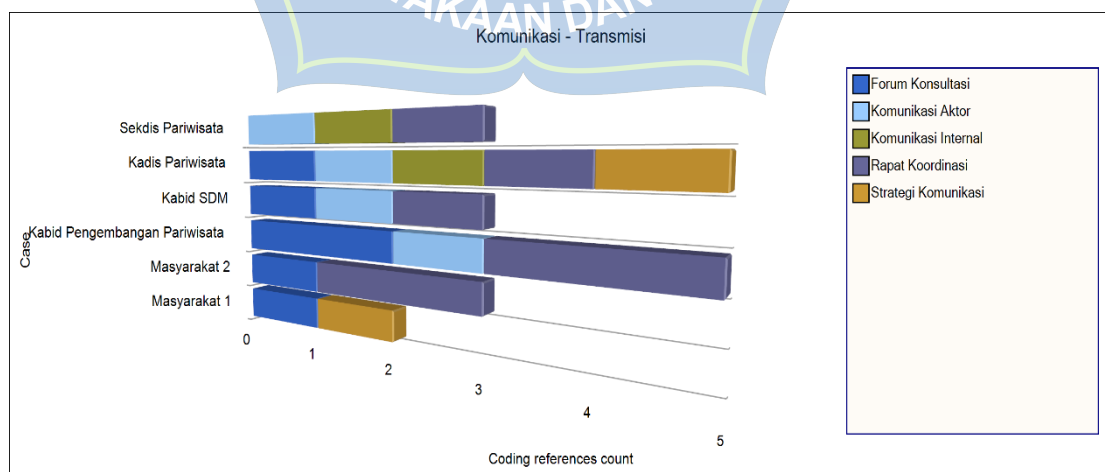
a. Komunikasi

Komunikasi memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam proses tersebut. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus

kebijakan publik di mana kebijakan yang telah dirancang dijalankan dan diterapkan di lapangan. Efektivitas komunikasi dalam tahap ini dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan berhasil dicapai. Ada beberapa sub indicator dalam penilaian komunikasi pada implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Transmisi

Transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses pengiriman atau penyaluran pesan atau informasi dari pihak yang berwenang atau pihak yang merancang kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Proses transmisi ini penting untuk memastikan bahwa pesan atau informasi tentang kebijakan yang akan diimplementasikan dapat disampaikan dengan jelas, tepat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan yang terlibat. Penyampaian informasi yang baik, agar kebijakan tidak hanya disampaikan kepada para impelentor



akan tetapi bisa diterima oleh kelompok sasaran. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil transmisi komunikasi pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Komunikasi yang dilakukan para actor dalam proses implementasi kebijakan pariwisata itu terbilang bagus karena dalam setiap pelaksanaan kebijakan, para actor terus berkomunikasi dengan pihak pelaksana di lapangan guna mengetahui sampai mana progres dilapangan” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan hampir semua actor pelaksana baik dari pemerintah maupun pelaksana dilapangan, metode yang digunakan dalam mentransmisikan informasi yaitu membuat forum konsultasi, rapat koordinasi, dan strategi komunikasi agar transmisi atau pengiriman pesan informasi dapat terlaksana dengan baik dengan pelaksana dilapangan.

Informan MA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba juga mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:

"Sebagai pejabat pemerintahan daerah di Kabupaten Bulukumba, kami terlibat aktif dalam proses implementasi kebijakan pariwisata. Komunikasi kami dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi antar-dinas terkait. Selain itu, kami juga berkomunikasi secara rutin dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan nasional untuk memastikan keselarasan dan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan. Seluruh informasi dan perkembangan terkait kebijakan juga diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk sosial media dan acara publik." (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi informasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi Sulawesi Selatan agar komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah disepakati bersama, selain itu juga dibuatkan forum-forum konsultasi antar dinas-dinas terkait agar pemerintah bisa melakukan pemecahan masalah jika terjadi kendala di lapangan.

Informan MA juga mempertegas dengan memberikan sebuah pernyataan bahwa:

"Proses komunikasi dimulai dengan mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan rutin dengan perwakilan dari pelaku bisnis pariwisata dan komunitas lokal terkait pariwisata. Dalam pertemuan-pertemuan ini, kami membahas potensi, permasalahan, dan peluang dalam industri pariwisata serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan yang saling mendukung". (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari Hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengadakan pertemuan rutin dan rapat koordinasi dengan pelaku bisnis pariwisata dapat menciptakan langkah-langkah yang strategis untuk

mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang saling mendukung agar keberhasilan dalam kebijakan pengembangan pariwisata dapat tercapai.

Informan R selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata juga mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:

“Melakukan sosialisasi kebijakan kepada semua aktor yang terlibat, termasuk masyarakat umum, untuk memastikan pemahaman yang sama tentang visi, tujuan, dan manfaat dari kebijakan pariwisata. Rutin mengadakan forum dan rapat koordinasi untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi terbaru dan saling berbagi pandangan serta masukan”.(Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi implementasi kebijakan pariwisata kabupaten Bulukumba juga dilakukan sosialisasi kepada semua aktor yang terlibat guna mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan pariwisata Kabupaten Bulukumba, sehingga manfaat dari kebijakan pariwisata dapat dirasakan oleh semua pihak terutama pihak yang menjadi target sasaran.

Hal senada juga disampaikan oleh informan IA selaku Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Uraian pernyataan sebagai berikut:

“Komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Kementerian Pariwisata sangat penting dalam memastikan keselarasan kebijakan pariwisata antara tingkat pemerintahan nasional dan lokal. Koordinasi secara berkala membantu memastikan bahwa kebijakan dan program pariwisata berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rutin mengadakan forum dan rapat koordinasi untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi terbaru dan saling berbagi pandangan serta masukan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Transmisi Komunikasi juga dilakukan dengan kementrian pariwisata untuk memastian hirarki kebijakan mulai dari nasional hingga ke daerah berjalan dengan baik. Dalam perjalanannya dilakukan juga koordinasi secara rutin agar kebijakan yang sedang berjalan sesuai yang diharapkan, dengan mengadakan rapat koordinasi secara rutin untuk memastikan semua pihak yang terllibat mendapatkan informasi terbaru.

Selain informan dari pihak pemerintah peneliti juga melakukan wawancara dengan informan masyarakat. Informan S selaku masyarakat mengungkapkan bahwa:

"Kami sebagai warga masyarakat di Kabupaten Bulukumba merasa penting untuk turut berperan dalam proses implementasi kebijakan pariwisata. Komunikasi dengan pemerintah daerah dan para pelaku industri pariwisata biasanya dilakukan melalui pertemuan desa, dialog terbuka, dan diskusi kelompok kecil. Selain itu, kami juga berusaha untuk aktif menyampaikan aspirasi dan masukan melalui saluran komunikasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pengaduan masyarakat dan kotak saran." (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

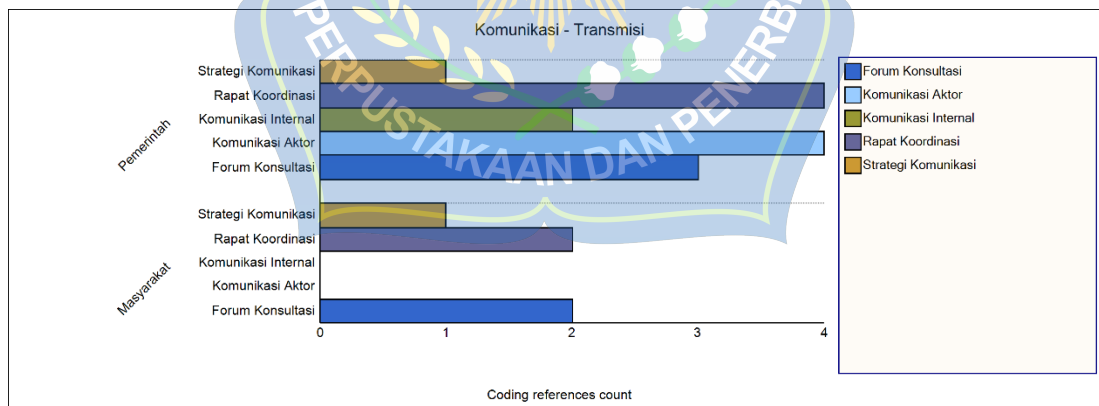
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses penyampaian informasi kebijakan dengan malalui rapat-rapat koordinasi yang disediakan oleh pemerintah agar masukan dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Hal tersebut juga dipertegas informan M selaku masyarakat dengan mengungkapkan bahwa:

"Kami berperan dalam memberikan masukan dan dukungan dalam proses implementasi kebijakan pariwisata. Komunikasi antara kami dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan melalui pertemuan-pertemuan diskusi, forum konsultasi, dan kelompok kerja bersama. Kami juga berusaha untuk berkomunikasi dengan anggota asosiasi secara rutin melalui pertemuan berkala dan saluran komunikasi internal lainnya untuk menyampaikan informasi terkini dan memperoleh masukan dari mereka." (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah terjalin dengan baik dengan melalui pertemua-pertemuan atau forum konsultasi, sehingga informasi dapat tersalurkan dengan baik kepada para actor yang terlibat.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan dengan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 fitur *Crosstab* sebagai berikut:

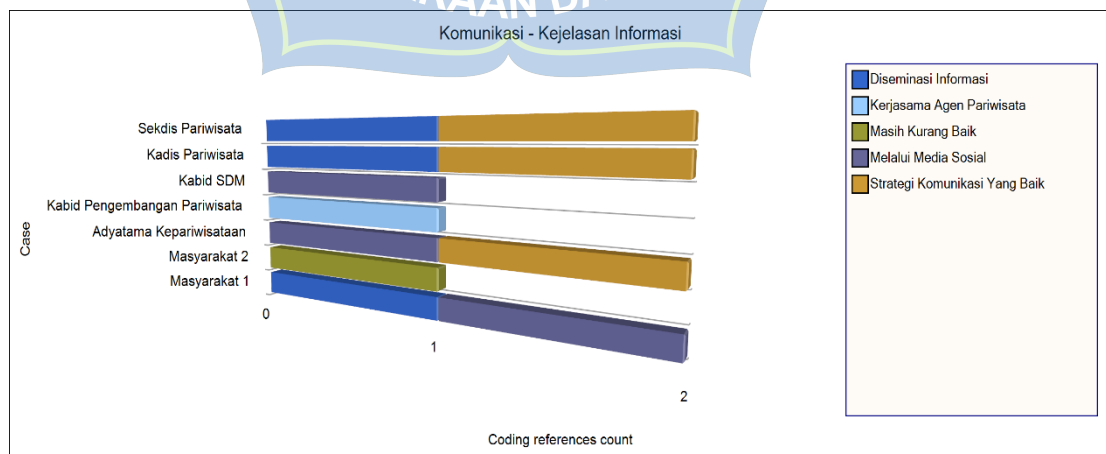


Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa proses transmisi informasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dilakukan dengan berbagai cara seperti rapat koordinasi, komunikasi antar

internal, komunikasi antar actor, dan forum konsultasi. Hal tersebut dilakukan agar informasi dapat tersalurkan dengan baik dan juga arah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan dilaksanakannya forum-forum komunikasi agar masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah.

2. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi dalam komunikasi pada implementasi kebijakan mengacu pada tingkat ketegasan dan kemudahan pemahaman pesan atau informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kejelasan informasi merupakan faktor penting dalam proses komunikasi karena dapat mempengaruhi sejauh mana pesan dapat dipahami, diterima, dan diterapkan dengan benar oleh penerima. Setelah kebijakan di transmisikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran



secara jelas maka masing-masing mengetahui apa maksud, tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan kebijakan agar efektif. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil kejelasan informasi komunikasi pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Sejauh ini informasi mengenai kebijakan pariwisata telah berjalan dengan cukup baik. Kami telah berupaya keras untuk memastikan informasi tersebut tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, dengan menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat dan juga memastikan informasi mudah diakses.

Informan R selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mengungkapkan bahwa :

“Kami telah menjalin kerjasama dengan agen perjalanan lokal dan internasional. Mereka mendapatkan akses ke informasi terkini tentang pariwisata Bulukumba, yang memungkinkan mereka untuk

menyediakan paket perjalanan yang menarik dan menggugah minat bagi wisatawan potensial”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

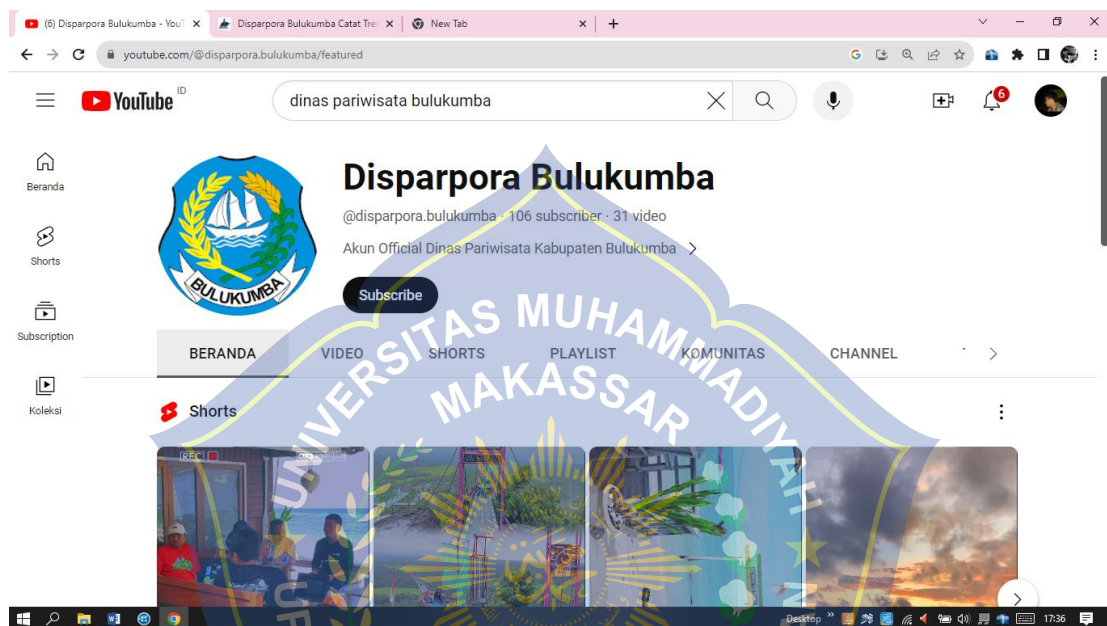
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan kejelasan informasi dinas pariwisata melakukan kerjasama dengan agen perjalanan wisata agar mereka mendapatkan informasi secara langsung tentang perkembangan kebijakan pariwisata, dengan tujuan menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba.

Informan MA selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba juga mengungkapkan bahwa:

“Kamis Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, berupaya menjalankan strategi komunikasi dan diseminasi informasi yang lebih baik untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata. Melalui berbagai upaya, kami berpendapat bahwa informasi pariwisata telah mengalami peningkatan signifikan. Kami telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menyebarkan informasi terkait pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Pertama, kami memiliki situs web resmi Dinas Pariwisata yang secara teratur diperbarui dengan berita dan acara terkini seputar pariwisata di daerah kami. Kedua, kami memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan destinasi wisata, potensi unggulan, dan kegiatan pariwisata kepada masyarakat luas. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan media lokal untuk menyebarkan informasi melalui berita dan liputan khusus”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata kabupaten Bulukumba menjalankan strategi komunikasi yang baik juga diseminasi informasi yang baik. Yang bertujuan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Dinas pariwisata juga mengembangkan startaegi kejelasan informasi melalui

sosial media dengan menyebar luaskan informasi menggunakan situs web dan media sosial yang dikelola langsung oleh dinas pariwisata hal tersebut dilakukan untuk memperkenalkan destinasi wisata, potensi unggulan, dan kegiatan seputar pariwisata kepada masyarakat luas.



Gambar diatas merupakan implementasi dari dinas pariwisata dalam memberikan kejelasan informasi dengan menggunakan sosial media You Tube untuk memberikan informasi mengenai beragam destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba agar menarik minat wisatawan datang berkunjung.

Hal senada diungkapkan Informan IA selaku Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini, informasi dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan akses informasi terkait pariwisata di wilayah ini melalui berbagai saluran komunikasi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperbarui dan meningkatkan situs web resmi Dinas Pariwisata Bulukumba. Situs web tersebut menyediakan informasi terkini mengenai objek wisata, acara budaya, akomodasi, dan berbagai layanan yang ada di wilayah ini. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut untuk merencanakan kunjungan mereka”.(Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan implementasi kebijakan cukup baik. Dinas Pariwisata telah melakukan peningkatan akses informasi dengan berbagai saluran informasi seperti situs web yang menyediakan berbagai macam informasi terkini mengenai objek wisata, acara budaya, serta event pariwisata. Dengan dilakukannya peningkatan kejelasan informasi menggunakan situs web diharapkan meningkatnya kunjungan wisatawan.

Informan I. Selaku Adyatama Kepariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa strategi yang kami terapkan untuk memastikan informasi pariwisata tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. kami telah meningkatkan kehadiran di media sosial dan situs web resmi Dinas Pariwisata Bulukumba. Melalui platform ini, kami secara aktif mempublikasikan informasi terbaru, foto, dan video terkait destinasi wisata, serta menyediakan kontak yang dapat dihubungi untuk pertanyaan lebih lanjut.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi komunikasi implementasi kebijakan pariwisata berjalan dengan baik dengan memastikan informasi yang ada dapat diakses secara terbuka dan

mudah oleh masyarakat pada platform sosial media yang sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Selain informan dari pemerintah peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Informan S sebagai masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, informasi mengenai kebijakan pariwisata di Bulukumba sudah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah aktif dalam menyebarkan informasi melalui media sosial, website resmi, dan papan pengumuman di tempat-tempat strategis. Saya merasa cukup terinformasi mengenai acara-acara wisata, lokasi wisata terbaru, dan kebijakan-kebijakan terkini yang berkaitan dengan sektor pariwisata”. (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi kebijakan pariwisata yang disampaikan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat pun mengetahui informasi mengenai acara-acara pariwisata yang dilaksanakan, dengan melihat sosial media Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba juga dari papan papan pengumuman yang ditempatkan pada tempat yang strategis. Selain informan S terdapat pula informan M selaku Masyarakat yang mengungkapkan bahwa :

“Sayangnya, menurut pengamatan saya, informasi tentang kebijakan pariwisata Bulukumba masih belum berjalan dengan baik. Saya sering kesulitan mencari informasi terbaru tentang acara-acara wisata dan promosi tempat-tempat wisata dikarenakan akses jaringan yang belum baik di daerah saya. Lebih banyak lagi langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memastikan informasi tersebut sampai kepada

masyarakat dengan lebih efektif.” (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba belum memiliki akses jaringan yang baik sehingga informasi belum bisa diakses masyarakat, seperti contohnya daerah wisata kahayya dan air terjun bravo 45 yang ada di kecamatan Kindang.

Berdasarkan semua pernyataan dari pemerintah dan masyarakat dapat disimpulkan dengan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 sebagai berikut:



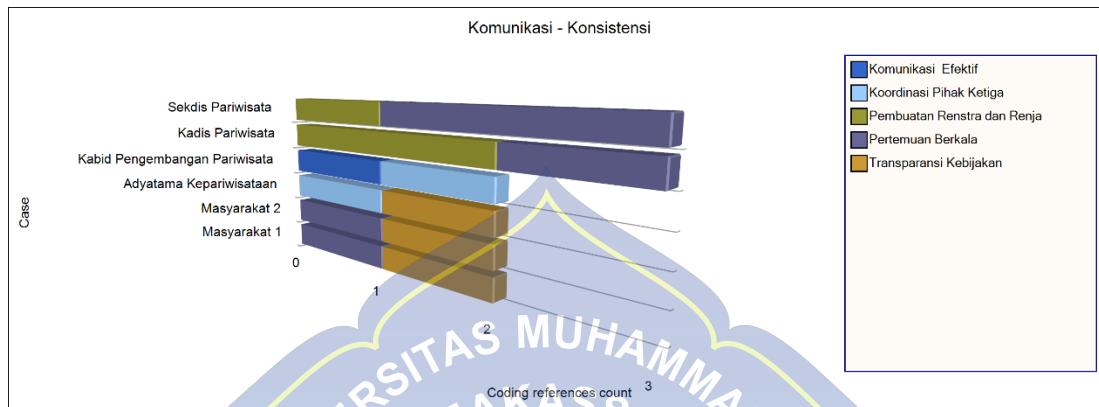
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi komunikasi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik karena pemerintah melakukan diseminasi informasi kepada seluruh kalangan masyarakat, juga dengan meakukan starategi komunikasi yang baik, Pemerintah juga melakukan penyebaran informasi lewat sosial media seperti you tube dan website yang

dikolala langsung oleh dinas pariwisata agar harapannya aksesibilitas informasi secara cepat kepada masyarakat tetapi dalam proses penyebaran informasi masih terkendala oleh akses teknologi seperti jaringan yang belum merata ke pelosok daerah di Kabupaten Bulukumba sehingga masyarakat yang disana masih kurang mendapat informasi mengenai pariwisata Bulukumba.

3. Konsistensi

Konsistensi dilakukan agar kebijakan tidak berubah-ubah, jika kebijakan tidak konsisten yang maka dapat membingungkan pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak optimal. Konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pariwisata merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam pengembangan sektor pariwisata. Konsistensi komunikasi berarti menyampaikan pesan yang sama dengan cara yang konsisten kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam industri pariwisata. Konsistensi komunikasi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan sasaran dari kebijakan pariwisata. Pesan yang jelas dan konsisten akan membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pariwisata, berbagai macam informasi harus dikomunikasikan kepada masyarakat, baik lokal maupun wisatawan. Konsistensi komunikasi memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Komunikasi yang

konsisten memudahkan dalam melacak progres implementasi kebijakan pariwisata. Jika ada perubahan atau penyesuaian yang diperlukan, pemangku kepentingan dapat lebih mudah memahami dan menerapkan perubahan tersebut jika komunikasi sebelumnya telah konsisten. Berikut uraian hasil



analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil konsistensi komunikasi pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan MA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata telah menyusun rencana strategis yang berisi tujuan jangka panjang, sasaran, dan indikator keberhasilan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bulukumba. Rencana ini mencakup semua aspek pariwisata, termasuk konservasi alam, promosi pariwisata, penguatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya rencana strategis yang jelas, diharapkan kebijakan yang diimplementasikan dapat tetap berada pada jalur yang sesuai.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata harus menerapkan rencana strategis yang berisi tujuan jangka panjang dari kebijakan pariwisata tersebut, karena dengan mengacu pada renstra arah kebijakan yang sedang dilaksanakan menjadi lebih terarah sehingga komunikasi juga menjadi terarah dan jelas. Selain dengan renstra dinas pariwisata juga menerapkan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal senada juga disampaikan oleh informan FF selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan uraian sebagai berikut:

“Pastikan kebijakan pariwisata direncanakan dengan matang dan mendalam. Perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk memahami dampak potensial kebijakan dan bagaimana implementasinya di lapangan. Membuat panduan dan pedoman yang jelas mengenai implementasi kebijakan pariwisata akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang rutin akan membantu mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan secara cepat dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kebijakan pariwisata harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaannya. Fleksibilitas ini dapat membantu mencapai konsistensi dalam jangka panjang”.
(Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlu direncanakan dengan matang dan mendalam agar proses implementasi kebijakan dapat terarah dan konsisten, juga dengan membuat suatu pedoman acuan seperti renstra dan renja agar semua pihak yang terlibat dapat

memahami tupoksi masing-masing. dan kebijakan harusnya cukup fleksibel dengan situasi dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan nantinya sehingga mencapai kekonsistenan dalam jangka panjang. Perlu juga dilakukan pertemuan secara berkala dengan stakeholder yang terlibat guna mengetahui sampai mana progres kebijakan juga untuk meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

Informan I selaku Adyutama Kepariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengungkapkan bahwa:

“Dalam mengimplementasikan kebijakan, kami menjaga sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Dengan menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas, kami dapat dengan mudah melacak progres dan mengidentifikasi masalah yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dalam menjaga konsistensi komunikasi melakukan pengawasan dan akuntabilitas kebijakan yang ketat sehingga memudahkan pelacakan jika terjadi masalah yang memungkinkan mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu untuk menjaga komunikasi berjalan dengan sesuai dilakukan juga komunikasi dengan pihak ketiga secara berkala sehingga tujuan dari kebijakan pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan baik dan berhasil. Dan juga perlu dilakukan transparansi kebijakan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mengetahui sejauh mana progres kebijakan.

Informan R selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata juga mengungkapkan bahwa :

“Kami juga berkomitmen untuk memberikan komunikasi yang efektif tentang kebijakan pariwisata kepada semua pihak terkait. Transparansi dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah yang akan diambil dalam implementasi adalah kunci untuk menciptakan pemahaman dan dukungan dari masyarakat. Dengan membangun pemahaman bersama, kebijakan memiliki landasan yang kuat, dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat diminimalisir”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menkonsistensikan komunikasi kebijakan pengembangan pariwisata diperlukan komunikasi yang efektif kepada semua pihak agar tujuan dari kebijakan berjalan dengan tepat sesuai yang diharapkan. Dalam menjaga konsistensi komunikasi diperlukan juga transparansi kebijakan agar langkah-langkah yang akan diambil menjadi kunci untuk menciptakan arah tujuan komunikasi yang benar sehingga mendapat dukungan dari masyarakat.

Selain informan dari pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. informan M selaku masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Saya sebagai Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pariwisata secara rutin. Melalui mekanisme ini, potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan tujuan awal kebijakan bisa terdeteksi lebih cepat, dan tindakan perbaikan dapat diambil”. (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga konsistensi komunikasi berjalan dengan baik diperlukan pengawasan secara rutin melalui forum-forum komunikasi dengan melibatkan masyarakat, agar

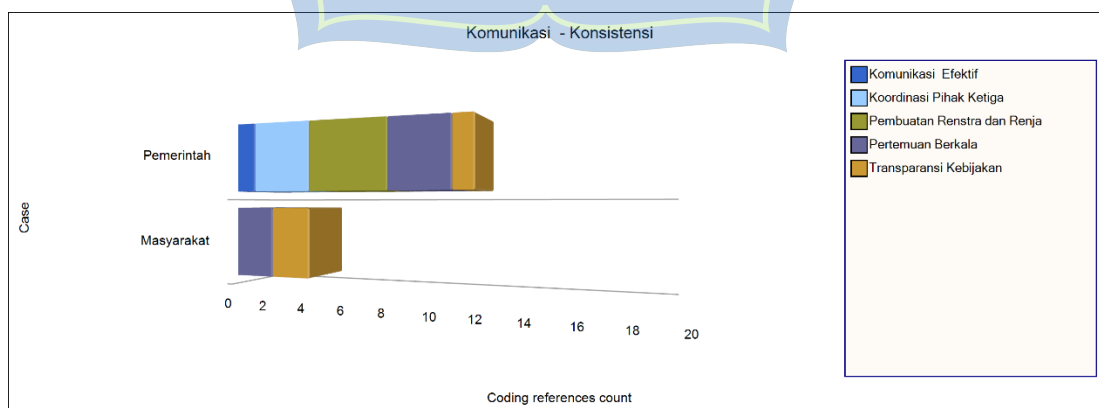
potensi adanya masalah-masalah dapat dengan cepat diminimalisir sehingga implemnetor dapat dengan cepat mengambil tindakan perbaikan dengan cepat.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan S Selaku masyarakat dengan mengatakan bahwa:

“Sebagai warga Bulukumba yang aktif terlibat dalam sektor pariwisata, saya menyadari pentingnya kebijakan yang konsisten dan tidak berubah-ubah untuk memajukan pariwisata di wilayah ini”. (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga komunikasi berjalan dengan baik dan konsisten diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah dengan masyarakat. Diperlukan juga adanya transparansi kebijakan agar kebijakan yang sedang berjalan tidak berubah ubah sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Dari semua pernytaan diatas baik dari pemerintah dan masyarakat dapat dapat disimpulkan dengan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 sebagai berikut:



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga konsistensi komunikasi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba, diperlukan komunikasi yang efektif, koordinasi dengan pihak ketiga, pertemuan berkala, pembuatan restra jangka panjang dan transparansi kebijakan, kepada semua stakeholder yang terlibat sehingga tujuan dari kebijakan pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan baik.

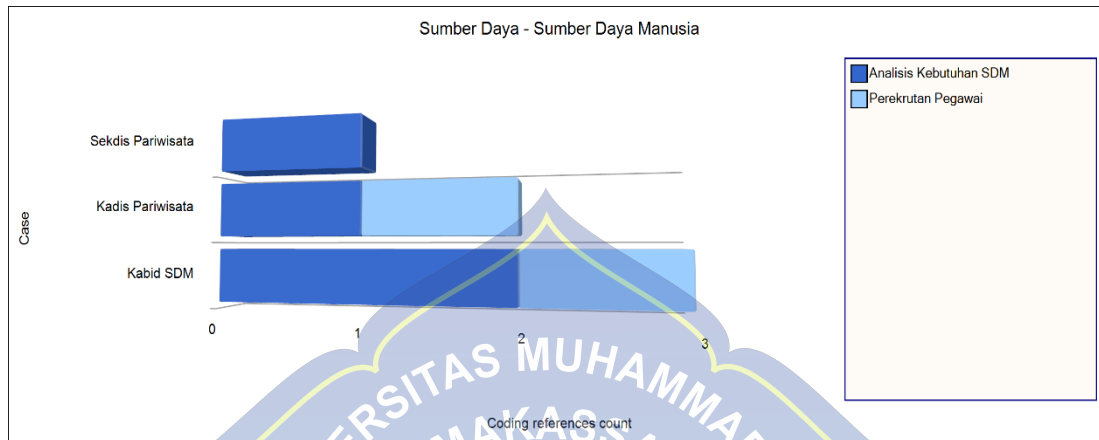
b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan pariwisata mengacu pada berbagai aspek yang menjadi dasar atau modal untuk menjalankan kebijakan pariwisata secara efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dan Sumber daya dalam implementasi kebijakan pariwisata merujuk pada semua elemen dan faktor yang diperlukan untuk mewujudkan dan mendukung tujuan pariwisata suatu daerah atau negara. Dalam konteks ini, sumber daya adalah modal atau aset yang menjadi dasar bagi pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran destinasi wisata. Sumber daya tersebut dapat bersifat, manusia, finansial, material, dan informasi.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pariwisata adalah komponen yang sangat penting dan menentukan keberhasilan industri pariwisata suatu daerah atau negara. Sumber daya manusia mencakup semua orang yang terlibat dalam industri pariwisata, mulai dari pekerja di sektor pariwisata hingga pemangku kepentingan terkait lainnya. Sumber daya

manusia juga merupakan Pelaksana dari sebuah kebijakan yang memadai dan kompeten sesuai dengan bidang yang diperlukan. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil Sumber Daya Manusia pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan IA Selaku Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif , dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata akan melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan dan skala kebijakan pariwisata Bulukumba. Ini melibatkan memahami jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan, tingkat keahlian yang diperlukan, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Setelah penerimaan dilakukan, Dinas Pariwisata akan menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang baru direkrut maupun yang sudah ada. Pelatihan ini dapat berupa peningkatan keterampilan kerja, peningkatan pengetahuan tentang destinasi pariwisata di Bulukumba, serta pemahaman tentang

cara memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata terlebih dahulu melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang ingin digunakan agar sesuai dengan skala dan tujuan kebijakan pariwisata. Setelah melakukan analisis kebutuhan Dinas Pariwisata selanjutnya dilakukan pelatihan dan pengembangan bagi pelaksana yang baru lulus atau yang sudah lama, focus dari pelatihan tersbut berguna untuk meningkatkan keterampilan kerja, dan peningkatan pengetahuan tentang kepariwisataan. Dalam proses pelaksanaan pelatihan dengan melibatkan beberapa ahli dalam bidang pariwisata contohnya akademisi dan para actor palaku dalam pariwisata.

Infroman FF Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, yang mengungkapkan bahwa:

“Penentuan pegawai atau pelaksana dalam proses kebijakan harus didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban. Pariwisata merupakan industri yang kompleks dan dinamis, oleh karena itu, memilih pegawai yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sektor pariwisata, kemampuan dalam manajemen destinasi, dan pemahaman tentang tren pariwisata merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perekrutan harus didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan bidang pariwisata agar nantinya pegawai atau pelaksana dapat

mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan, agar nantinya pelaksana memiliki kemampuan dan pemahaman tren pariwisata terkini sehingga kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan MA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian sebagai berikut:

“Kami melakukan analisis menyeluruh terkait kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam sektor pariwisata. Hal ini melibatkan mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan yang dibutuhkan, seperti pemandu wisata, petugas informasi pariwisata, operator tur, dan lain sebagainya. Kami menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan terkait untuk mengoptimalkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan. Ini akan membantu memastikan bahwa tenaga kerja yang dipilih memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata terlebih dahulu melakukan analisis terkait kebutuhan sumber daya manusia, setelah itu melakukan proses perekrutan atau pengembangan pegawai agar dalam pelaksanaan kebijakan para pegawai atau pelaksana bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing.

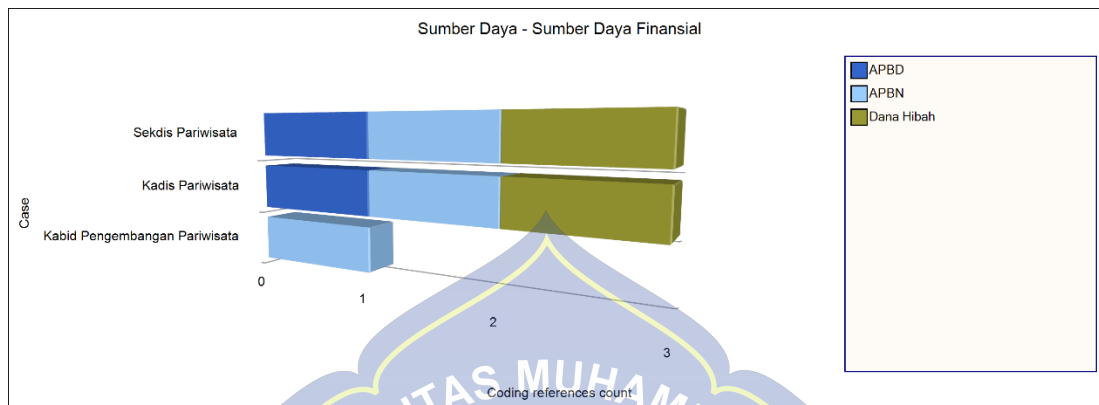
Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua proses dalam penentuan sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pertama yaitu dengan melakukan analisis

mendalam terkait dengan kebutuhan yang ada pada sector pariwisata, kedua dengan melakukan perekrutan pegawai atau pelaksan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan selanjutnya mengadakan program pelatihan dengan bekerja sama pihak lembaga pendidikan pelatihan kepariwisataan guna mengoptimalkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan pengembangan pariwisata.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan pariwisata mengacu pada segala bentuk dana dan sumber keuangan yang diperlukan untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, dan proyek pariwisata suatu daerah atau negara. Sumber daya finansial ini penting untuk membiayai berbagai aspek pengembangan, promosi, pengelolaan, dan peningkatan destinasi pariwisata. Sumber daya finansial digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, bandara, pelabuhan, fasilitas transportasi publik, dan akomodasi. Investasi dalam infrastruktur pariwisata yang memadai penting untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi dan kenyamanan wisatawan. Dana diperlukan untuk membiayai pengelolaan destinasi pariwisata, termasuk biaya operasional kantor pariwisata, pengawasan lingkungan, kebersihan, dan pemeliharaan situs-situs bersejarah dan warisan budaya. Bagian dari sumber daya finansial dapat dialokasikan

untuk membantu pengembangan kapasitas komunitas lokal agar mereka dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari industri pariwisata. Ini termasuk dukungan untuk usaha kecil dan menengah, pelatihan kewirausahaan, dan



program pemberdayaan masyarakat. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil Sumber Daya Manusia pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagian besar dana untuk implementasi kebijakan pariwisata biasanya berasal dari anggaran pemerintah. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat mengalokasikan dana dari anggaran negara atau daerah untuk mendukung proyek-proyek yang terkait dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pajak pariwisata, biaya masuk objek wisata, izin operasional, dan sumber pendapatan lainnya yang terkait dengan aktivitas pariwisata. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan dan proyek yang mendukung pariwisata”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk implementasi kebijakan berasal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dana tersebut digunakan untuk mengalokasikan proyek-proyek yang terkait dengan kepariwisataan seperti contohnya proyek yang sedang berjalan yaitu pembangunan pintu gerbang di destinasi wisata kahayya. Selain itu sector pariwisata juga dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah khususnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hal senada juga diungkapkan oleh MA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian sebagai berikut:

“Dana untuk proses implementasi kebijakan bersumber dari pemerintah daerah sendiri ada juga dari pemerintah provinsi dalam bentuk dana hibah dan dari pemerintah pusat atau dana alokasi khusus.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data finansial yang digunakan untuk implementasi kebijakan pariwisata bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan bentuk Hibah kepada pemerintah daerah, dan dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat atau kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif.

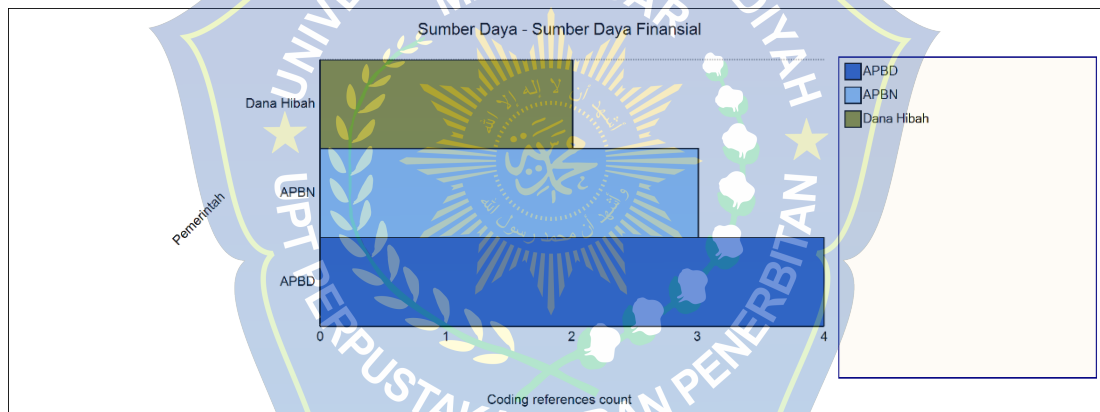
Informan R Selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga dapat mengajukan proposal proyek pariwisata ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek-proyek yang dianggap strategis dan berdampak luas pada tingkat nasional bisa mendapatkan dukungan dana dari APBN.”(Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengaalokasian sumber daya finansial terlebih dahulu Dinas Pariwisata mengajukan proposal pengajuan dana kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam proposal yang diajukan terdapat beberapa usulan proyek-proyek starategis yang nantinya akan dilaksanakan untuk kebijakan pengembangan pariwisata.

Dari semua pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:



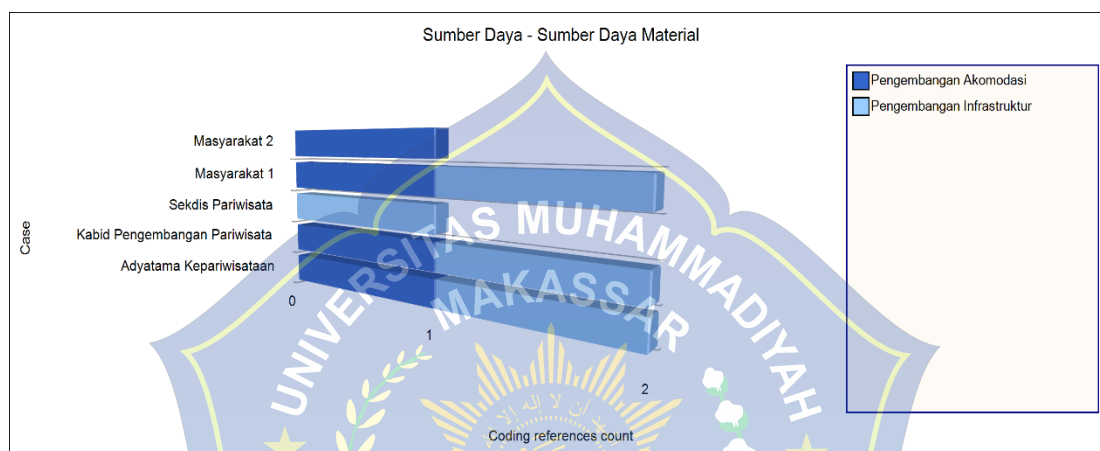
Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dari segi sumber daya finansial menggunakan dana dari tiga pihak diantaranya yang pertama adalah dari dana APBD yang berasal dari pemerintah daerah, dana APBD ini menjadi penunjang terbesar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, yang kedua berasal dari APBN atau dana alokasi

Khusus, dana ini berasal dari pemerintah pusat atau dari kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia, dana ini menjadi penunjanan terbesar kedua setelah dana APBD, yang ketiga adalah dana dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang disalurkan dalam bentuk dana hibah yang biasanya diserahkan langsung oleh Gubernur melalui forum-forum resmi.

3. Sumber Daya Material

Unsur sumber daya yang bersifat fisik seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kebijakan pariwisata. Sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan pariwisata mengacu pada segala bentuk dana dan sumber keuangan yang diperlukan untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, dan proyek pariwisata suatu daerah atau negara. Sumber daya finansial ini penting untuk membiayai berbagai aspek pengembangan, promosi, pengelolaan, dan peningkatan destinasi pariwisata. Sumber daya finansial digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, bandara, pelabuhan, fasilitas transportasi publik, dan akomodasi. Investasi dalam infrastruktur pariwisata yang memadai penting untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi dan kenyamanan wisatawan. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya material ini dengan baik sangat penting dalam implementasi kebijakan pariwisata. Dengan memastikan ketersediaan dan

kualitas sumber daya material yang memadai, destinasi pariwisata dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan bagi para wisatawan, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil Sumber Daya Material pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan MA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Pertama-tama, kami melakukan identifikasi terhadap lokasi dan objek wisata potensial yang perlu dikembangkan. Kami berfokus pada wilayah-wilayah yang memiliki daya tarik alam, budaya, dan sejarah yang unik serta potensial untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Setelah infrastruktur dibangun, kami membentuk tim khusus untuk mengelola dan merawat sarana dan prasarana tersebut.

Tim ini bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sumber data material, dinas pariwisata terlebih dahulu melakukan identifikasi jenis wisata potensial yang ada di kabupaten Bulukumba guna membangun infrastruktur sarana dan prasarana agar meningkatkan kunjungan wisatawan. Dinas pariwisata juga membuat tim khusus untuk mengelola infrasruktur yang di bangun tersebut serta bertanggung jawab atas keamana, kebersihan dan pelayanan pada destinasi wisata.

Informan R selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata juga mengungkapkan bahwa:

“Dinas pariwisata melakukan pengembangan akomodasi, Banyak hotel, resort, dan penginapan lainnya dibangun atau ditingkatkan standar pelayanannya. Ini membantu menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi para wisatawan” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata untuk peningkatan sumber daya material, dinas pariwisata melakukan pengembangan akomodasi dengan menghadirkan hotel-hotel, resort dan penginapan lainnya yang berguna untuk wisatawan jika ingin bermalam atau menginap, yang tentunya dinas pariwisata memperhatikan standar pelayanan yang diterapkan agar wisatawan merasa nyaman dan ingin berkunjung kembali nantinya.

Informan I selaku Adyamata Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba juga mengungkapkan bahwa:

Dinas Pariwisata melakukan peningkatan fasilitas publik: Fasilitas publik, seperti toilet umum, tempat parkir, dan tempat istirahat, ditingkatkan kualitasnya agar pengalaman wisatawan lebih nyaman dan menyenangkan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata membangun fasilitas publik seperti toilet umum, tempat paker, dan tempat ibadah yang nantinya bisa meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung dan juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kunjungan wisatawan karena diberikan kenyamanan berupa fasilitas public yang bagus.

Selain informan dari pemerintahan peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat. Informan S selaku masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya mekanisme penggunaan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pariwisata di Bulukumba telah mengalami perubahan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor pariwisata dan masyarakat setempat telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana secara efisien.” (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah bekerja dengan baik dalam pembuatan sarana dan parasana pada destinasi wisata, hal tersebut dipandang cukup positif oleh masyarakat karena dapat meningkatkan wisatawan berkunjung sehingga pendapatan masyarakat pun

akan meningkat dan juga dapat menambah pemasukan daerah dari sector pariwisata.

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan M selaku masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Meurut saya pemerintah telah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pariwisata seperti jalan raya, transportasi umum, dan akomodasi. Dengan memperbaiki aksesibilitas ke tempat-tempat wisata, lebih banyak pengunjung dapat mengakses dan menikmati pesona alam dan budaya di Bulukumba. Peningkatan kualitas jalan-jalan juga membantu meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung.” (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata telah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas saran dan prasarana wisata dengan memperbaiki atau membangun jalan raya yang menjadi akses utama pada suatu destinasi wisata, dengan meningkatkan aksesibilitas ke tempat-tempat wisata dapat menambang kunjungan wisatawan untuk datang berwisata di Kabupaten Bulukumba.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata dalam menjalankan kebijakan pengembangan pariwisata sudah baik dalam menyediakan sarana dan prasana seperti mennyediakan hotel-hotel, tempat penginapan untuk wisatawan serta memberikan pelayanan yang baik, dinas pariwisata juga meningkatkan aksesibilitas ke tempat-tempat wisata seperti membuat atau memperbaiki jalan-jalan, mebuat toilet umum, tempat ibadah dan tempat parkir, peningkatan kualitas akomodasi diharapkan dapat

menarik minat wisatawan baik dari mancanegara atau domestic untuk datang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba.

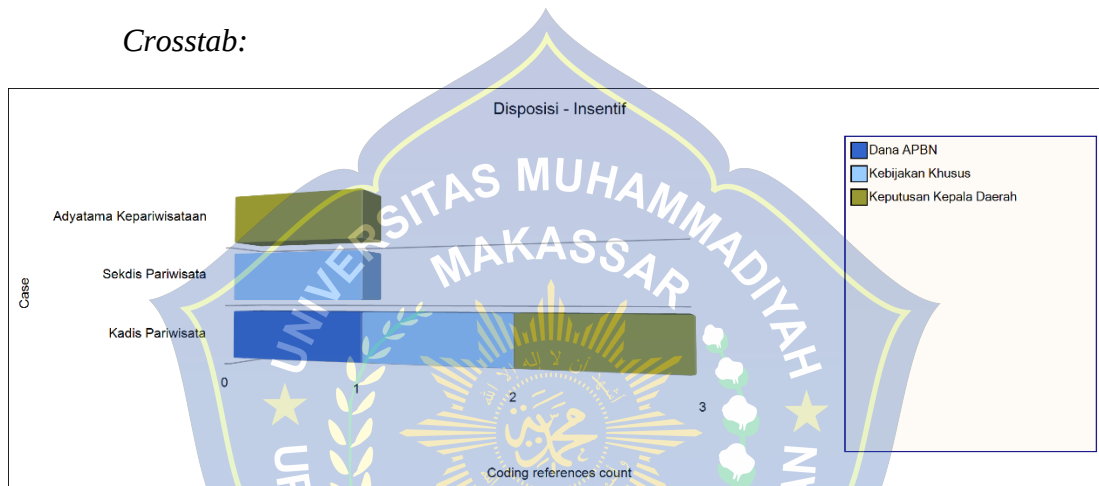
c. Disposisi

Disposisi pada implementasi kebijakan pariwisata merujuk pada proses pengalokasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat bisa meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pariwisata, masyarakat lokal, sektor swasta, dan stakeholder lainnya. Disposisi harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata memiliki peran yang jelas dan tanggung jawab yang spesifik. Misalnya, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal, dan lembaga pariwisata bertugas mempromosikan destinasi wisata. Disposisi harus mempertimbangkan alokasi sumber daya yang tepat bagi masing-masing pihak agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini termasuk anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan lain-lain.

1. Insentif

Insentif dalam implementasi kebijakan adalah berbagai jenis stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh pihak pemberi kebijakan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendorong dan memotivasi mereka dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Insentif dapat berbentuk

materiil maupun non-materiil dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, kinerja, dan akhirnya keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Memberikan insentif berupa penambahan keuntungan atau biaya untuk para pelaksana khususnya kepada pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat pada diri maupun organisasi untuk tercapainya tujuan kebijakan. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 degan fitur *Crosstab*:



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil Insentif pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu, dalam implementasi kebijakan pariwisata, pemberian upah tambahan atau insentif kepada pekerja atau pelaku usaha pariwisata dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, ada beberapa aturan yang mengatur tentang pemberian upah tambahan dalam konteks pariwisata. Beberapa di antaranya

dapat disebutkan sebagai berikut Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) Program Insentif Pariwisata Pengaturan Upah Lembur Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian insentif kepada pelaksana atau pekerja diatur oleh kebijakan upah minimum regional yang dimana termasuk upah lembur, dan insentif pengembangan keterampilan, hal tersebut dilakukan agar mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Dan pemberian insentif juga diatur dalam kebijakan kepala daerah.

Hal senada diungkapkan oleh MA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dengan uraian sebagai berikut:

“Secara umum, pemberian upah tambahan atau insentif bagi pekerja di industri pariwisata biasanya diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Kebijakan tersebut dapat beragam, tergantung pada hukum tenaga kerja yang berlaku di daerah tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian insentif kepada pelaksana atau pegawai, secara tegas diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dapat beragam disetiap daerah tergantung daerahnya sendiri yang berarti terdapat pula keputusan khusus dari kepala daerah,

Informan I Selaku Adyatama Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba juga mengungkapkan bahwa:

Secara umum, ada beberapa kriteria yang sering dipertimbangkan dalam pemberian upah tambahan atau insentif bagi pelaku industri pariwisata di Bulukumba. Pertama, kontribusi nyata terhadap pengembangan pariwisata daerah, seperti jumlah kunjungan wisatawan yang berhasil ditarik, peningkatan pendapatan daerah dari

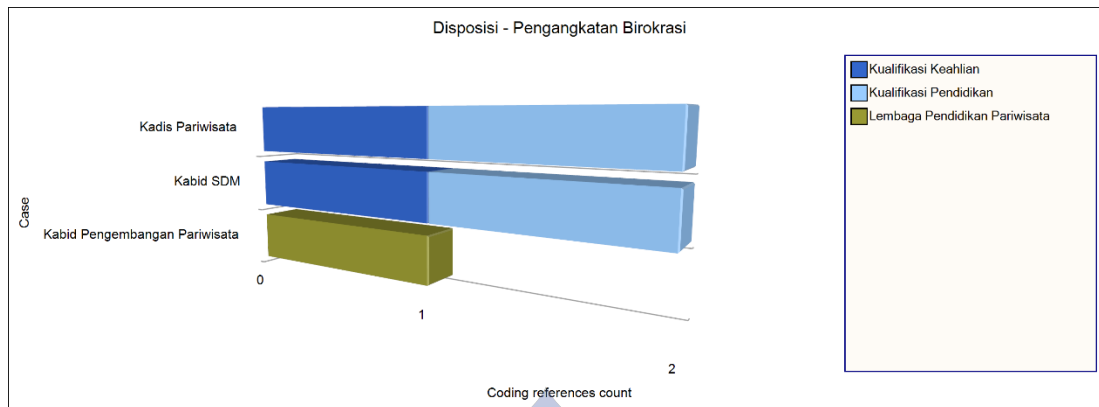
sektor pariwisata, dan kontribusi pada pemberdayaan masyarakat setempat. Kedua, tingkat pelayanan dan kualitas produk pariwisata juga dapat menjadi faktor penting dalam penentuan pemberian upah tambahan. Pelaku pariwisata yang memberikan layanan yang baik dan produk unggulan cenderung mendapatkan pengakuan lebih besar daripada yang lain.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian insentif kepada pelaksana atau pegawai terdapat beberapa kriteria diantaranya adalah dengan melihat sejauh mana kontribusi peningkatan implementasi kebijakan dan faktor peningkatana pelayanan juga dapat mempengaruhi dalam pemberian insentif.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian insentif kepada pelaksana atau pegawai diatur dalam beberapa kebijakan diantaranya undang-undang ketenaga kerjaan dan keputusan kepala daerah. Pemberian insentif memiliki beberapa kriteria dalam penentuannya, seperti melihat sejauh mana kontribusi peningkatan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dan juga ktiteria peningkatan pelayanan.

2. Pengangkatan Birokrasi

Saat pemilihan dan pengangkatan pegawai pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi dan hasrat yang kuat serta komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan terutama untuk kepentingan masyarakat. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 degan fitur *Crosstab*:



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil pengangkatan birokrasi pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam implementasi kebijakan pariwisata, perekrutan pegawai atau pelaksana menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin efektivitas dan kesuksesan pelaksanaan program-program pariwisata. Oleh karena itu, kami memiliki standar prosedur atau SOP yang telah ditetapkan untuk mengelola proses perekrutan dengan baik dan menghindari ketidakberesan. Diantaranya Penetapan Kebutuhan. Pengumuman Lowongan: Seleksi Administratif: Penilaian Kompetensi, Keputusan Akhir, Evaluasi Kinerja.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perekrutan pegawai harus memiliki SOP yang telah ditetapkan. SOP diperlukan dalam perekrutan agar menghindari ketidakberesan dalam proses perekrutan. Pada saat perekrutan perlu juga memperhatikan kualifikasi keahlian dan kualifikasi

pendidikan agar nantinya pegawai atau pelaksana dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap tugas yang diberikan.

Informan IA Selaku Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM

Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengungkapkan bahwa:

“Mekanisme perekrutan pegawai atau pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan pariwisata di Bulukumba telah dirancang dengan cermat untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian tenaga kerja dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata daerah kami.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan birokrasi harus dirancang dengan baik dan teliti untuk memastikan kesesuaian kebutuhan tenaga pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Informan R Selaku Kepala Bidang Pengembangan Pawisata juga mengungkapkan bahwa:

“Dalam upaya untuk memastikan keberhasilan kebijakan pariwisata, kami melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, masyarakat setempat, dan perwakilan industri pariwisata, dalam proses perekrutan. Ini memungkinkan kami untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan birokrasi diperlukan keterlibatan dari pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan dalam hal ini politeknik pariwisata, masyarakat setempat, dan perwakilan industry pariwisata.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, perekrutan pegawai harus memiliki SOP yang telah ditetapkan. SOP diperlukan dalam perekrutan agar menghindari ketidakberesan dalam proses perekrutan, dan proses pengangkatan birokrasi juga harus dirancang dengan baik dan teliti untuk memastikan kesesuaian kebutuhan tenaga pelaksana. Dalam proses pengangkatan birokrasi perlu melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam bidang pariwisata agar pegawai atau pelaksana nantinya memahami tugas dan tanggung jawabnya.

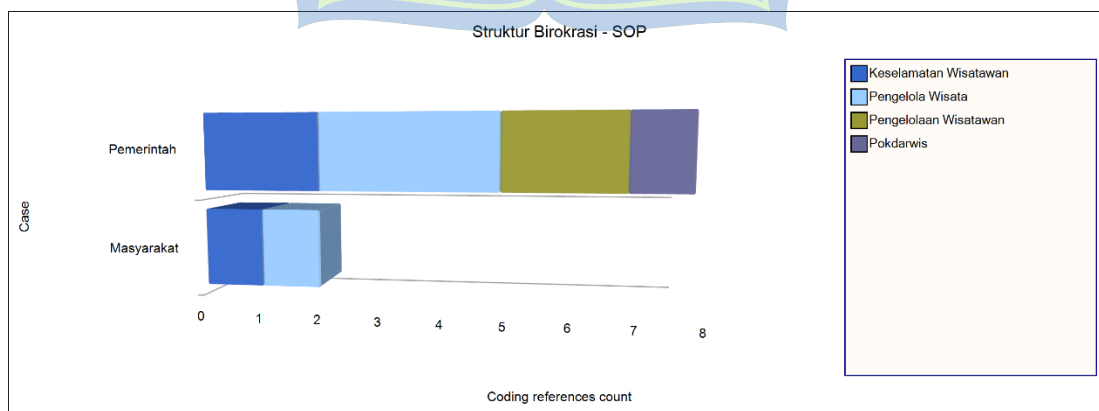
d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pariwisata adalah organisasi dan hierarki yang terdiri dari berbagai unit dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan pariwisata. Struktur birokrasi ini memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata suatu negara atau daerah.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan pariwisata adalah serangkaian petunjuk atau pedoman tertulis yang mengatur langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. SOP bertujuan untuk menciptakan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait

pariwisata, serta untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan dalam implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik. SOP membantu mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dengan menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dan memberikan panduan yang jelas, SOP membantu para pelaksana mengetahui apa yang diharapkan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan adanya SOP, proses pelaksanaan kebijakan pariwisata dapat berjalan lebih efisien. Para pelaksana dapat mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan tanpa harus mencari tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Penting untuk mencatat bahwa SOP harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan konteks lokal serta disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. SOP yang baik harus mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan tujuan kebijakan pariwisata yang ingin dicapai. SOP juga harus diperbarui secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kebijakan atau keadaan yang mungkin terjadi dalam industri pariwisata. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil Standar Operasional Prosedur pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan FF Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“SOP di lapangan dalam implementasi kebijakan pariwisata dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keselamatan dalam industri pariwisata. Beberapa SOP yang diimplementasikan meliputi Pengelolaan Taman, Destinasi Wisata Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pengelolaan Wisatawan”. (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa SOP dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dirancang dalam industry pariwisata dengan SOP untuk Pengelolaan Taman, destinasi wisata dan keselamatan wisatawan, hal tersebut dilakukan agar jika terjadi sesuatu kepada wisatawan dapat diminimalisir dampaknya. Dan yang menjadi pelaksana dalam pengelolaan SOP tersebut adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dan pokdarwis dari desa tempat wisata tersebut berada.

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan IA Selaku Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan uraian sebagai berikut:

SOP Pengelolaan Destinasi Wisata SOP ini mencakup langkah-langkah untuk menjaga, mengelola, dan merawat destinasi wisata di Bulukumba.

Ini termasuk pemeliharaan infrastruktur, penanganan sampah, kebersihan lingkungan, dan perlindungan terhadap potensi kerusakan lingkungan.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan SOP destinasi wisata juga termasuk pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan perlindungan terhadap potensi kerusakan lingkungan, agar wisatawan menjadi nyaman untuk berlibur.

Informan S sebagai masyarakat mempertegas tentang SOP pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dengan mengungkapkan bahwa :

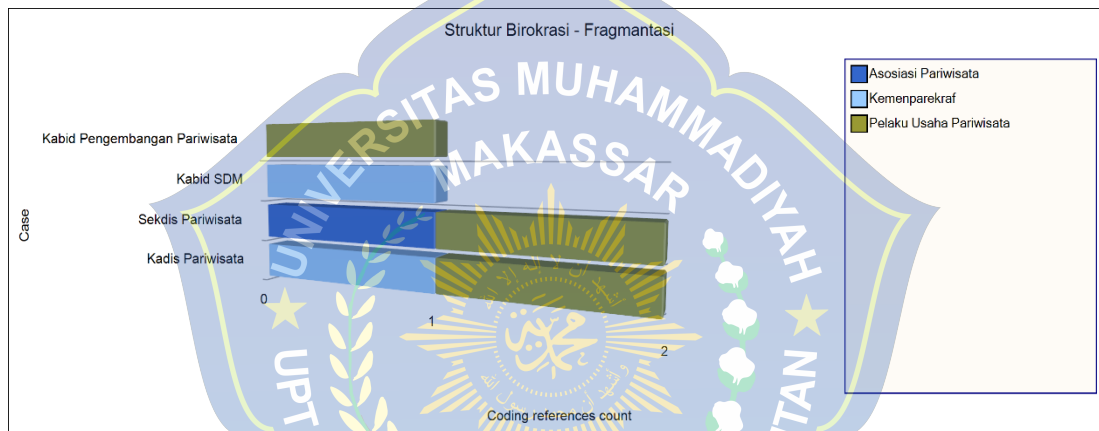
“Salah satu SOP yang cukup krusial adalah terkait keselamatan di objek wisata. Misalnya, SOP evakuasi darurat harus jelas dan mudah dipahami oleh seluruh petugas dan pengelola wisata. Selain itu, SOP pencegahan kebakaran, bencana alam, dan tindakan darurat lainnya harus selalu diperbarui dan dipraktikkan secara rutin.” (Hasil wawancara tanggal 22 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hal krusial dalam SOP ini adalah terkait keselamatan wisatawan di objek wisata. SOP keselamatan wisata harus benar – benar dijalankan sesuai prosedur agar jika sesuatu terjadi misalnya kebakaran atau bencana alam dapat cepat diatasi atau dilakukan evakuasi darurat.

2. Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dengan melibatkan organisasi luar tanpa adanya tumpang tindih.

Fragmentasi dalam implementasi kebijakan pariwisata mengacu pada kondisi di mana pelaksanaan kebijakan pariwisata terpecah atau terpisah-pisah menjadi bagian-bagian yang tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tidak mengalir secara lancar atau efektif karena adanya pemisahan dan ketidaksesuaian antara berbagai komponen atau unit yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut uraian hasil analisis menggunakan aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab*:



Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo Plus 12 dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil Standar Operasional Prosedur pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan MA Selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami bekerja sama dengan asosiasi pariwisata yang melibatkan para pelaku industri pariwisata di tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Kolaborasi dengan asosiasi ini membantu kami

memperoleh pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dan memahami kebutuhan serta potensi pariwisata di Bulukumba.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata melakukan kerja sama dengan asosiasi pariwisata yang melibatkan para pelaku industry, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan diperolehnya pandangan dari berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan dan memahami potensi Pariwisata di Bulukumba.

Informan FF selaku Sekretaris Dinas Pariwisata juga mengungkapkan bahwa:

“Lembaga Penelitian dan Pendidikan, Organisasi dari luar seperti universitas atau lembaga penelitian contohnya politeknik pariwisata. dapat berperan dalam memberikan pengetahuan, analisis, dan data yang mendukung perumusan kebijakan pariwisata yang lebih baik dan berkelanjutan. Mereka juga dapat membantu menyusun program pelatihan dan pendidikan bagi pelaku pariwisata setempat.” (Hasil wawancara tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata melibatkan lembaga pendidikan atau universitas dalam penyebaran tugas dan tanggung artinya dinas pariwisata melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, yang tentunya tanpa adanya tumpang tindih dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab.

Informan IA selaku kepala bidang Pemasaran, Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengungkapkan bahwa:

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Kementerian ini memiliki peran penting dalam memberikan arahan, dukungan, dan bantuan teknis terkait dengan pengembangan dan promosi pariwisata di tingkat nasional maupun regional. Mereka telah memberikan pedoman dan saran untuk membantu daerah kami meningkatkan daya tarik wisata serta memperkuat infrastruktur pariwisata.” (Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata bekerja sama dengan kementrian pariwisata dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab, hal tersebut diharapkan agar mendapatdukungan dan bantuan teknis terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata.

Informan R Selaku Kepala Bidang Pengemangan Pariwisata juga mengungkapkan bahwa:

“Pelaku Usaha Pariwisata, Banyak masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam industri pariwisata, seperti pengelola homestay, pedagang suvenir, dan pemandu wisata. Dukungan kepada pelaku usaha lokal membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka.”(Hasil wawancara tanggal 20 Juli 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan pariwisata dinas pariwisata melakukan penyebaran tugas dengan bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata hal tersebut diharapkan agar banyak masyarakat atau pelaku usaha terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata.

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata dalam melakukan penyebaran tugas dan tanggung jawab dengan melibatkan asosiasi pariwisata dengan harapan mendapatkan pandangan dari berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan dan memahami potensi

Pariwisata di Bulukumba. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan khusus kepariwisataan, dan pihak dari kementrian pariwisata dengan harapan mendapat dukungan dan bantuan teknis terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan unsur pelaksana seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana utama kebijakan, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat local. Dari semua pelaksana yang ada harus terlibat secara langsung dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector pariwisata.

Dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata juga terdapat program-program yang dijalankan seperti melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk para pegawai atau pelaksana dan juga melakukan pemasaran pariwisata melalui sosial media seperti you tube dan web site yang dikelola langsung oleh dinas pariwisata

Dan proses implementasi kebijakan juga mempunyai target atau kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan, seperti masyarakat

local, wisatawan domestic, dan wisatawan local. Dengan adanya target yang ditetapkan maka dinas pariwisata dapat menentukan promosi yang tepat untuk menarik wisatawan datang berkunjung, yang tentunya jika jumlah kunjungan meningkat maka akan berpengaruh juga terhadap pendapat asli daerah dan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang bekerja pada sector pariwisata akan meningkat

Hal ini senada dengan temuan (Akib, 2010) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan diperukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu dilihat dari perspektif pelaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Untuk itu proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Bulukumba perlu dilaksanakan sebaik-baiknya demi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

2. Keberhasilan Implmentasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba

a. Komunikasi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dari komunikasi yang dijalankana sudah berjalan dengan baik karena transmisi komunikasi dengan melakukan forum

konsultasi, komunikasi dengan actor, rapat koordinasi, dan menjalankan strategi komunikasi yang baik, Hal tersebut dilakukan agar informasi dapat tersalurkan dengan baik dan juga arah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan dilaksanakannya forum-forum komunikasi agar masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah.

Selain transmisi komunikasi terdapat juga kejelasan informasi yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, dinas pariwisata melakukan diseminasi informasi, kerja sama agen pariwisata, kejelasan informasi melalui media sosial dan strategi komunikasi yang baik agar komunikasi para pegawai atau pemangku kepentingan lainnya mendapat informasi secara baik, tetapi masih terdapat kejelasan informasi yang masih kurang baik seperti masih terdapat beberapa daerah destinasi wisata yang masih kurang jaringan internet sehingga kejelasan informasi masih kurang mejangkau ke pelosok daerah.

Dalam komunikasi diperlukan juga konsistensi dalam memberikan informasi dengan menerapkan komunikasi yang efektif, melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga, melakukan pertemuan berkala, melakukan transparansi kebijakan, dan harus sesuai dengan pembuatan renstra dan renja. Dengan adanya renstra dan renja dapat menjadi pedoman atau pelaksana dalam melaksanakan komunikasi secara konsisten

b. Sumber Daya

Sementara sumber daya khususnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik karena dinas pariwisata terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan SDM, setelah mengetahui berapa banyak kebutuhan, selanjutnya melakukan perekrutan pegawai atau pelaksana.

Setelah melakukan pemenuhan sumber daya manusia, selanjutnya melakukan pemenuhan sumber daya finansial dalam hal ini menentukan dana yang ingin digunakan yang berasal dari dana APBD, APBN, dan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk Hibah kepada pemerintah daerah. Dari proses pelaksanaan sumber daya finansial diatas sudah berjalan dengan baik sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.

Kemudian untuk sumber daya material sudah berjalan dengan baik dengan melakukan pengembangan akomodasi untuk destinasi wisata yang ada dan melakukan pengembangan infrastruktur seperti membuat atau memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dengan infrastruktur yang menunjang dapat membuat kunjungan wisatawan menjadi meningkat dan akan berdampak pula pada pendapatan asli daerah yang juga akan meningkat.

Tetapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terdapat sumber daya informasi yang masih kurang dalam keterbatasan teknologi, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, dan masih

kurangnya kesadaran masyarakat. Tetapi para pegawai atau pelaksana dilapangan sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Sementara Menurut (Nakamura & Smallwood, 1980). Dalam implementasi kebijakan melibatkan sejumlah sumber, termasuk di dalamnya manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

c. Disposisi

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik dengan dua disposisi yang dilakukan diantaranya pemberian insentif bagi pelaksana atau pegawai dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, dan pemberian insentif kepada pegawai atau pelaksana sudah diatur oleh kebijakan khusus dan keputusan kepala daerah, dana yang digunakan untuk pemberian insentif berasal dari dana APBN atau sudah diatur ke dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Selanjutnya dengan pengangkatan birokrasi dalam hal ini pelaksanaan perekrutan pegawai harus memiliki kualifikasi khusus dalam bidang pariwisata, kualifikasi pendidikan yang relevan dengan pariwisata sehingga nantinya pegawai atau pelaksana dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang mengemukakan bahwa disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan tadi dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian mengungkapkan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik dengan fragmentasi yang dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti asosiasi pariwisata, kementerian, dan pelaku usaha pariwisata. Tetapi masih terdapat tumpang tindih dalam pemberian tugas yang dikarenakan adanya perubahan kebijakan, perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi.

Dan adanya SOP dalam penanganan keselamatan wisatawan, pengelolaan wisata, pengelolaan wisatawan dan keterlibatan pokdarwis, yang tentunya dengan tujuan agar wisatawan yang datang berkunjung merasa aman dan nyaman sehingga kunjungan wisatawan pun akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang mengemukakan bahwa struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan hubungan dan hubungan antar unit-unit organisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

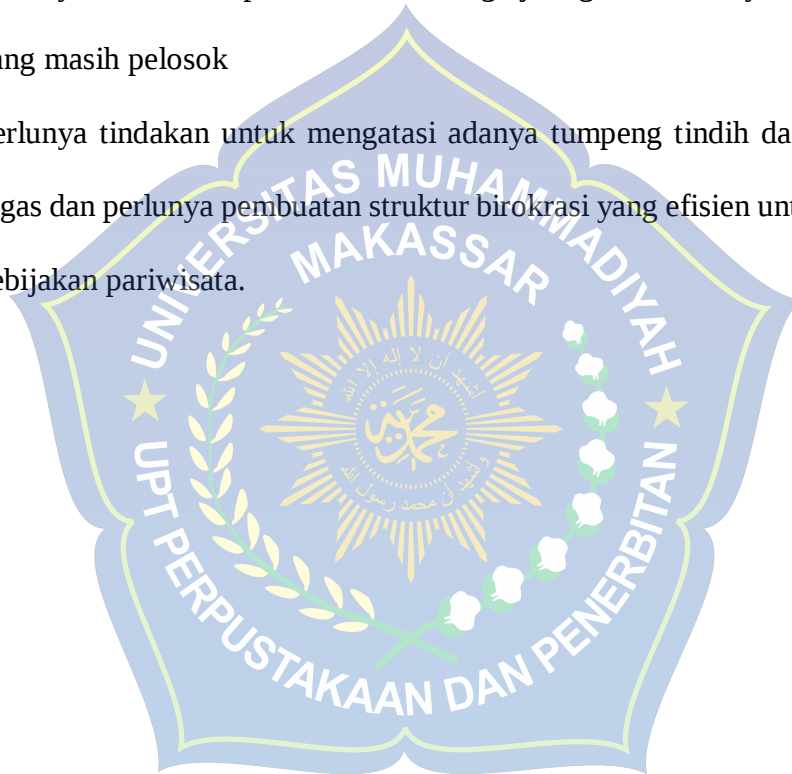
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik dengan Dinas Pariwisata yang menjadi eksekutor utama masyarakat sebagai pendukung dalam proses implementasi kebijakan dan menetapkan program-program strategis untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan dan juga menetapkan target atau sasaran dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
2. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba cukup berhasil dengan komunikasi dalam implementasi kebijakan pariwisata berjalan dengan mentransmisikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan sudah konsisten dalam melakukan komunikasi. Dan sumber daya juga sudah mencakup untuk sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi tetapi untuk sumber daya informasi masih terdapat kekurangan. Disposisi juga sudah berjalan dengan baik untuk pemberian insentif dan pengangkatan birokrasi yang diharuskan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. Yang terakhir untuk struktur birokrasi masih ada beberapa tanggung jawab yang tumpang tindih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan implmentasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten bantaeng, beberapa saran tersebut antara lain:

1. Perlunya dilakukan perbaikan teknologi jaringan khususnya daerah-daerah yang masih pelosok
2. Perlunya tindakan untuk mengatasi adanya tumpang tindih dalam pemerian tugas dan perlunya pembuatan struktur birokrasi yang efisien untuk mengelola kebijakan pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.
- Almeida-García, F. (2018). Analysis of tourism policy in a developing country: the case of Morocco. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 10(1), 48–68. <https://doi.org/10.1080/19407963.2017.1312420>
- Anggara, S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Cv. Pustaka Setia.
- Anggraeni, F. (2016). *Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Periode 2014-2015)*.
- Anisa, A., & Arifin, J. (2021). Implementasi Kebijakan Perbup No.18 Tahun 2021 (Perubahan Atas Perbup No 26 Tahun 2020) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Serandang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Stiatabalong*, 4(18), 1270–1282.
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Improving policy implementation through collaborative policymaking. *Policy and Politics*, 45(3), 467–486. <https://doi.org/10.1332/030557317X14972799760260>
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Vol. 4, Issue 1).
- Eldi Mulyana. (2019). Upaya Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Masyarakat Melalui Pengembangan Bisnis Ekowisata. *BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal* 38, 1 No.1 201(1), 38–43.
- Fajri, A. (2017). Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. In *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* (Vol. 5, Issue 1).
- Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A sustainable tourism policy research review. *Sustainability (Switzerland)*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/su11113187>
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10.
- I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M., Agung Pramuja, S. A., & Dkk. (2019). Buku

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 1–2. https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/Buku_Peningkatan_Pendapatan_Aslil_Daerah_Watermark.pdf
- Ismayanti. (2020). *Dasar-Dasar Pariwisata*. http://repository.usahid.ac.id/322/1/Draf_Buku_Dasar-dasar_Pariwisata_-_Ismayanti_%281%29.pdf
- Keller, P. (2015). *Tourism policy in advanced economies: how can it be effective and efficient?*
- Laut, L. T., Sugiharti, R. R., & Panjawa, J. L. (2021). Does tourism sector matter in regional economic development. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 832–837. <https://doi.org/10.30892/GTG.37313-715>
- Mentari, A. (2022). *Kontribusi Pemungutan Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba*.
- Murdiastuti, A., Rohman, H., & Suji. (2014). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance. In *Buku Pustaka Radja*.
- Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Wisata Berkelanjutan di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2(1), 73–93.
- Pandita, G. (2017). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata* <http://repository.ub.ac.id/6550/>
- Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., A. (ed. . (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. In *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Desember 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2017 01-Pendapatan. https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_dan_Strategi_Peningkatan_Penda/Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1%0Ahttps://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-74.pdf
- Pujiastuti, T. B. S., ; Saptawan, A., & Purnama, D. H. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3), 1–8.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>
- Rodríguez, I., Williams, A. M., & Hall, C. M. (2014). Tourism innovation policy: Implementation and outcomes. *Annals of Tourism Research*, 49, 76–93.

<https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.08.004>

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*.
- Sya'rawie, M. M. (2020). Pengembangan Sektor Pariwisata di Kaltim Menantang. *Pariwisata*, 7(2), 124–131. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp%0A124>
- Syawal, A. (2022). *The Implementation Of Sustainable Food Agriculture Land Protection Policy In Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tachan, H. (2006). *Impelentasi Kebijakan Publik* (D. M. dan C. Paskarina (ed.); 1st ed.). Truen RTH Bandung.
- Tangian, D., & Kumaat, G. M. E. (2020). *Pengantar Pariwwisata* (1st ed.). Polmino Press.
- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers* (Issue 1993).
- Widiprana, R. B., Ludigdo, U., & rosidi. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Pelaporan Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 3(3), 162–167.
- William N Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Pers.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif). In *CAPS (Center Of Academic Publishing Server)*. PT. Buku Seru.
- Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Universitas Airlangga Surabaya*. https://drive.google.com/file/d/1O-tF5Tpbqelql-xx_R6cWjIY_FczIex8/view?usp=drivesdk
- Yanti, N., & Hadya, R. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pad Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), 370. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3692>
- Ye, X., Sun, R., & Gao, J. (2012). *Polices study on sustainable tourism in China*. 573, 8–10.
- Zahra, A. L. (2010). A historical analysis of tourism policy implementation by local government. *Journal of Tourism History*, 2(2), 83–98. <https://doi.org/10.1080/1755182X.2010.498526>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhamad Gunawan

Nim : 105031100822

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	2%	5 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591